

**KEARIFAN LOKAL PETANI DALAM KETAHANAN PANGAN:  
Analisis atas Pola Hidup Petani Tradisional di Sumedang dan  
Perbandingannya dengan Masyarakat Agropolitan di Kabupaten Bandung**

**Laporan Penelitian Individual**

Mendapat Bantuan Dana dari DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung  
Tahun Anggaran 2015

Sesuai dengan Kontrak No.: Un.05/V.2/PP.00.9/126c-148/2015



Oleh:

**M. Taufiq Rahman, Ph.D.**

NIP: 197304041997031001

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
2015

## **Abstrak**

Penelitian ini adalah mengenai perbandingan antara pola hidup masyarakat petani tradisional di Sumedang dengan masyarakat petani yang berbasis manajemen modern di Bandung. Untuk mengetahui hal itu digunakanlah metode analisis kearifan individu dan jaringan sosial yang berusaha untuk mengetahui struktur produksi, distribusi, dan konsumsi yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini di dua tempat yang berbeda jenis budayanya, dengan menelusuri isu ketahanan pangan. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang memuat dua kelompok pertanyaan yaitu: 1) Kelompok identitas, 2) Kelompok pertanyaan pokok; kepada responden yang berjumlah 20 orang dilakukan dengan *snowball purposive sampling*. Hasil yang akan dicari dari penelitian ini adalah bagaimana pola kearifan masyarakat perdesaan yang relatif stabil, bahkan cenderung lebih merupakan budaya yang butuh waktu lama untuk mengubahnya di mana anggota masyarakat desa masih memilih hubungan dan aktivitas komunal dalam kegiatan ketahanan pangannya dibandingkan, dengan pola hidup masyarakat pertanian yang berada di bawah program pertanian pemerintah, yang notabene menggunakan budaya kemandirian.

**Kata Kunci:** Petani, ketahanan pangan, kearifan lokal, agropolitan

### ***Abstract***

*This research is about a comparison between traditional peasant society's ways of life of Sumedang and those of modern based agricultural management of Bandung. Discovering that kind of comparison this research used analytical methods of individual wisdom and social networking of the peasants to dig the existing structures of production, distribution, and consumption between the societies stressing on the issues of food security. Data collection was done by ways of deep interviews, observation, and document study focusing on two major questions: 1) identity group, 2) main questions; to 20 respondents taking snowball purposive sampling. The result of this research is that how a relatively stable wisdom of rural people, which is a very rigid culture to be changed, chooses a communal pattern of activities in their food security daily life; rather than that of a modern cultural lifestyle in the guided agricultural programmes.*

**Keywords: Peasant, food security, local wisdom, agropolitant**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan Laporan Penelitian ini. Penelitian ini mengkaji tentang “KEARIFAN LOKAL PETANI DALAM KETAHANAN PANGAN: Analisis atas Pola Hidup Petani Tradisional di Sumedang dan Perbandingannya dengan Masyarakat Agropolitan di Kabupaten Bandung.”

Untuk kajian ini, yang pertama-tama mesti diberikan ucapan terima kasih adalah ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN SGD Bandung, Dr. Sahya Anggara, Drs., M.Si. atas izin dan dukungan yang diberikannya kepada saya untuk melakukan penelitian ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pembantu Dekan I, Ahmad Ali Nurdin, Ph.D. yang telah memberikan petunjuk, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan kajian ini. Kemudian, saya pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, Dr. Deden Effendi, atas bantuan moril dan materil sehingga penelitian ini dapat terselenggara. Terima kasih pun saya sampaikan kepada semua orang yang terlibat dalam urusan keuangan UIN SGD Bandung, karena penelitian ini didanai oleh DIPA-BOPTAN UIN SGD Bandung Tahun Anggaran 2014. Akhir sekali, penghargaan untuk keluarga tersayang, teristimewa untuk isteri, dr. Fauziah Fatma dan kedua mata hati kami, Fathan Tibyan Rahman dan Fakhra Tabqiya Rahman yang telah bersabar, memberikan dorongan, dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini. Demikian juga kepada Bapak dan Ibu saya di Tasikmalaya, Drs. H. Muzakir dan Hj. Dedeh Hamidah, juga Ibu Mertua Hj. Imas Maliyah di Cimahi. Semoga jasa mereka mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, kami berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan, terutama bagi masyarakat Kabupaten Sumedang dan Bandung agar dapat mengelola pengetahuan yang ada dan berkembang di masyarakat sebagai suatu *local wisdom*.

Bandung, 4 Agustus 2015

M. Taufiq Rahman

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Pernyataan Bebas dari Plagiasi	
Abstrak	
Abstract	
Daftar Isi	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	7
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II     LANDASAN TEORETIS</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	13
B. Kerangka Berpikir .....	16
1. Ketahanan Pangan .....	16
2. Lembaga Perdesaan .....	18
3. Kearifan Lokal .....	24
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	34
B. Sumber Data .....	35
C. Jenis Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kondisi Umum .....	38
B. Hasil Penelitian .....	43
1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian .....	44
2. Kondisi Pertanian .....	53
C. Pembahasan .....	59
1. Masalah Ketahanan Pangan Petani .....	59
2. Lembaga Sosial Perdesaan .....	64
3. Kearifan Lokal untuk Ketahanan Pangan .....	67
<b>BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 2.1. Perbandingan Komunikasi Pembangunan .....	23
2. Tabel 4.1. Kepadatan Penduduk Kawasan Agropolitan.....	47
3. Tabel 4.2. Jumlah Penduduk per Lapangan Usaha .....	48
4. Tabel 4.3. Persentase Penduduk per Lapangan Usaha .....	48
5. Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Kecamatan Sumedang Selatan .....	49
6. Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Sumedang Selatan.....	50
7. Tabel 4.6. Jumlah Sekolah di Sumedang Selatan .....	51
8. Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian .....	51
9. Tabel 4.8. Potensi Ekonomi Masyarakat Sumedang Selatan .....	52
10. Tabel 4.9. Rata-Rata Produksi di Kawasan Agropolitan Ciwidey.....	53
11. Tabel 4.10. Rata-Rata Produksi di Sumedang Selatan.....	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan agenda penting bagi pemerintah Indonesia sehingga berbagai upaya selalu ditempuh agar program pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan maksimal sehingga mampu mencapai tujuan yang ingin diraih, yakni mensejahterakan rakyat. Fokus perhatian pembangunan tidak dilihat dari perspektif ekonomi semata di mana keberhasilan pembangunan dapat diukur dari meningkatnya produk nasional bruto, akan tetapi banyak faktor lain yang tidak boleh dikesampingkan misalnya faktor sosial, politik, dan lain-lain. Jika dibahas lebih mendalam, faktor-faktor tersebut mempunyai varian yang sangat luas misalnya bagaimana pemerataan hasil pembangunan serta partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.

Salah satu elemen yang tidak boleh diabaikan, khususnya dalam proses pembangunan di perdesaan, adalah petani. Golongan ini merupakan mayoritas penduduk di Indonesia sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan sangatlah signifikan. Banyak literatur yang mengemukakan bahwa selama ini petani hanyalah obyek dari pembangunan dan posisinya semakin termarginalkan. Lembaga-lembaga donor yang datang dengan berbagai bentuk bantuan untuk petani (baik dari pemerintah ataupun swasta) seolah merasa telah mengerti benar akan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan petani. Terlebih lagi mereka menganggap bahwa mereka merasa “lebih” dibanding petani baik dalam hal pengetahuan, pengalaman, keuangan, dan sebagainya. Dengan paradigma tersebut, dampaknya adalah bahwa pendekatan pembangunan yang hendak diterapkan tentu saja akan disesuaikan dengan perspektif mereka, bukan berdasarkan pandangan petani. Hal ini yang seringkali menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menilai keberhasilan pembangunan. Demikian karena keberhasilan pembangunan itu dilihat dari kaca mata lembaga donor tadi, bukan dari pihak petani. Bahkan lebih buruk lagi apabila pembangunan tersebut menemui kegagalan sama sekali jika dilihat dari kedua sisi. Robert Chambers (1993) dalam salah satu bukunya yang menjadi referensi dalam studi

pembangunan perdesaan yang berjudul “*Rural Development: Putting the Last First*” menegaskan bahwa seringkali kegagalan pembangunan disebabkan oleh kesalahan dalam penerapan pendekatan.

Selain penerapan pendekatan yang kurang tepat seperti yang diungkapkan oleh Chambers di atas, partisipasi petani sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pembangunan di perdesaan tidak boleh dipandang sebelah mata. Partisipasi yang dimaksud di sini adalah keterlibatan petani dalam mengidentifikasi permasalahan, merancang, dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan.

Oleh karena itu, ada banyak kegiatan untuk memajukan petani. Salah satu paradigma pemberdayaan petani adalah menggunakan pendekatan “*farmer first*”. Dalam konsep *farmer first*, menurut Chambers (1993), tujuan utama pemberdayaan adalah: (1) Petani difasilitasi oleh pihak luar dalam menganalisis kebutuhan dan prioritas. (2) Alih teknologi dari pihak luar kepada petani melalui prinsip-prinsip, metode-metode dan seperangkat pilihan-pilihan. (3) Petani diberikan kesempatan untuk memilih materi yang dibutuhkannya. (4) Karakteristik perilaku petani dicirikan oleh pengaplikasian prinsip-prinsip, memilih dari seperangkat pilihan-pilihan dan mencoba serta menggunakan metode-metode. (5) Hasil utama yang ingin dicapai oleh pihak luar adalah petani mampu meningkatkan kemampuan adaptasinya serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi petani. (6) Karakteristik model penyuluhan yang utamanya yaitu dari petani ke petani. (7) Agen penyuluhan berperan sebagai fasilitator dan pencari serta memberikan pilihan.

Dalam proses rantai makanan, pertanian adalah suatu usaha produksi yang didasari atas proses biologis/fisiologis pertumbuhan tanaman atau hewan. Sedangkan petani sendiri adalah orang yang melakukan produksi pertanian tersebut (Jayadinata, 1992: 71). Namun, dalam kenyataannya, petani justru hidupnya susah. Oleh karena itu, untuk memajukan petani perdesaan, pemerintah harus membangun pola pikir yang maju untuk petani agar apa yang diharapkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan pertanian di daerah tersebut dapat maju dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan tidak membuang biaya dan

tenaga. Petani pun dapat lebih berfikir maju walaupun hanya bertani di daerah asal, namun pertanian daerahnya dapat maju dan dapat membantu pemerintahan dalam masalah pangan yang semakin hari semakin meningkat kebutuhannya. Inilah yang kemudian melahirkan program-program pertanian pemerintah, yang diantaranya adalah konsep “agropolitan” (Rustiadi dan Pranoto, 2007: 90).

Sasaran pengembangan desa agropolitan merupakan kelanjutan dari program pembangunan perdesaan, yaitu terciptanya kondisi perdesaan yang kukuh, mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Pemanfaatan desa agropolitan yang mengarah pada keadaan pemerataan dan mendukung perekonomian masyarakat desa tentunya harus melalui tahapan sebagai berikut: (1) Mobilisasi sumberdaya lahan, (2) Mekanisme mobilisasi sumberdaya manusia, (3) Mekanisme mobilisasi sumberdaya teknologi dan modal, dan (4) Mekanisme operasional peningkatan sumberdaya sosial dan kelembagaan (Rustiadi dan Pranoto, 2007: 112-114).

Sementara itu, untuk lebih bersifat melestarikan, menghidupkan, dan melanjutkan budaya lokal, pemerintah pun mesti menghargai budaya pertanian lokal. Untuk itu, pemberdayaan petani berbasis kearifan lokal ditujukan agar sumber pendapatannya mampu mensejahterakan masyarakat di daerah itu. Atau lebih sederhananya, sebuah pembangunan akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengenal kebiasaan masyarakat atau potensi yang tepat untuk pembangunan di daerah tersebut.

Dan apakah yang akan terjadi apabila pemerintah tidak mengenal kebiasaan dan potensi petani? Pembangunan tersebut akan tidak tepat sasaran, bahkan mungkin akan menyengsarakan rakyat dan tidak membawa kemajuan berarti karena ketidakpahaman pemerintah terhadap kearifan lokal maupun kearifan budaya lokal pada daerah tersebut. Seperti halnya pertambangan emas di wilayah timur Indonesia. Mungkin hal itu membawa keuntungan bagi negara, tapi bagaimanakah tingkat kesejahteraan penduduk di sekitarnya? Nampaknya mereka masih ada pada garis kemiskinan yang mengakibatkan kurangnya pendidikan dan ketenagakerjaan.

Maka, digalilah, kemudian apa yang dinamakan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan pada level lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat perdesaan. Pemberdayaan petani berbasis kearifan lokal adalah pengelolaan pertanian oleh petani dengan sumber daya alam yang ada dan melakukan kegiatan pertanian dari perdesaan atau daerah lokal (Rakhmat, 2013: 54).

Dan itulah yang masih menjadi kelemahan pemerintah dalam memberdayakan petani dalam berbasis kearifan lokal. Di sinilah kita harus dapat merubah kelemahan itu menjadi kekuatan, agar rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan memiliki hak yang sama. Maka, kemiskinan yang selalu mengiringi masyarakat desa pun dapat berkurang, bukan malah bertambah tiap tahun.

Yang menjadi ironis adalah bahwa petani adalah produsen makanan, tetapi kadang kekurangan makanan –lebih tepatnya kurang gizi (malnutrisi). Di sinilah ketahanan pangan pun muncul sebagai isu besar dari dan bagi petani. Mengiringi hal tersebut adalah banyaknya upaya impor pangan dari pihak pemerintah. Lalu, di manakah kesalahannya sehingga kita tidak ‘daulat’ dalam hal pangan ini? Padahal, dalam Undang-undang Nomor 7 Tentang Pangan, bahwa pemerintah bersama masyarakat agar mewujudkan ‘ketahanan pangan’ bagi seluruh rakyat Indonesia (Sasongko, 2006: 62).

Persoalan-persoalan terkait petani, ketahanan pangan, dan kearifan lokal inilah yang menjadi sebab perlunya pembahasan dan penelitian lapangan, sehingga dapat muncul jawaban atas masalah-masalah di atas, dari kearifan lokal masyarakat kita sendiri.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, secara umum permasalahan yang dikaji adalah:

- a. Gambaran permasalahan petani dalam proses ketahanan pangan di perdesaan.

- b. Pemanfaatan kelembagaan sosial sebagai media penguatan ketahanan pangan yang ada di perdesaan.
- c. Kearifan lokal petani dalam penguatan ketahanan pangan di perdesaan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, tujuan penelitian yang dikaji adalah:

- a. Untuk menguraikan gambaran permasalahan petani dalam proses ketahanan pangan di perdesaan meliputi permasalahan produksi, distribusi, dan konsumsi.
- b. Untuk menyelidiki kearifan individual petani dalam penguatan ketahanan pangan di perdesaan meliputi jawaban atas permasalahan produksi, distribusi, dan konsumsi.
- c. Untuk mendeskripsikan kearifan komunal petani dalam penguatan ketahanan pangan di perdesaan meliputi jawaban atas permasalahan produksi, distribusi, dan konsumsi.
- d. Untuk menelisik kearifan budaya petani dalam penguatan ketahanan pangan di perdesaan meliputi jawaban atas permasalahan produksi, distribusi, dan konsumsi.
- e. Untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dapat diperbandingkan antara budaya pertanian tradisional di Sumedang Selatan dengan budaya pertanian modern di Wilayah Agropolitan Kabupaten Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari perspektif teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan studi Sosiologi dan Antropologi, khususnya Sosiologi dan Antropologi Pembangunan.

## **2. Manfaat Praktis**

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dan institusi terkait dalam pelaksanaan program pembangunan khususnya pembangunan di perdesaan yang memerlukan keterlibatan petani.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Pembangunan seringkali dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi, atau sebagai sebuah proses perbaikan (Siregar, 1991). Batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakekatnya merupakan *self projected reality*. Sumber perbedaan ini pun beragam, mulai dari perbedaan dalam perspektif epistemologis-ontologis pada tingkat falsafi, sampai kepada perbedaan penilaian atas arah dan tujuan pembangunan sebagaimana diwujudkan oleh umpan balik pembangunan itu sendiri pada tingkat empiris.

Pada tingkatan empiris, kemiskinan telah menjadi gambaran dasar bagi mereka yang hidup di daerah perdesaan, termasuk di antaranya adalah kaum petani (Dewanta dkk., 1995). Petani yang seharusnya menjadi orang yang paling beruntung, karena menjadi aktor utama penyediaan pangan; ternyata hanya dimanfaatkan saja oleh berbagai pihak yang sebetulnya tidak ikut membudidayakan pangan.

Dengan menggali dan mengembangkan kearifan lokal, kemiskinan tidak hanya dapat dikurangi (*relieved*) tetapi juga dapat dihindari (*prevented*) karena lestariannya sumberdaya bagi generasi berikutnya (Soerjani dalam Pattinama, 2009). Kearifan lokal mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan anti-kemiskinan. Bahwa di luar pendekatan yang bercorak strukturalis, sesungguhnya kita dapat menggali mozaik kehidupan masyarakat setempat yang bernama kearifan kolektif atau kearifan budaya. Di setiap masyarakat mana pun kearifan semacam itu tertanam dalam di relung sistem pengetahuan kolektif yang dialami bersama.

Itulah yang sering disebut sebagai *local-wisdom*. Para ahli juga sering menamakan *local-knowledge*, pengetahuan setempat yang berkearifan.

Kearifan lokal lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Di sini nampak tidak ada ilmu atau teknologi yang mendasarinya. Kearifan lokal meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu dan berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang. Kearifan lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang. Jadi kearifan lokal dapat dijadikan sebagai tali perekat dan pemersatu antar generasi (Tupan, 2011). Yang menjadi pertanyaan kemudian, adalah, “Apakah kearifan lokal ini bisa dijadikan kekuatan dalam zaman modern dan era globalisasi?” Tetapi fakta menunjukkan bahwa kehidupan masa kini di Indonesia tidak semuanya modern. Dan di tengah kekurang-modernan itu, kearifan lokal masih dapat menjadi pedoman perilaku kehidupan individual dan komunal di masyarakat (Rahman, 2011).

Diskusi secara makro tentang penghadapan petani dengan kemodernan itu telah dilakukan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Dianto Bachriadi, “Adakah Jalan Kedaulatan Pangan dan Pembaruan Agraria di Indonesia?” (Bernstein & Bachriadi, 2014) yang secara kritis mengurai kebijakan yang menyengsarakan petani atau salah sasaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Begitu pula di negara-negara lain di sekitar Asia Tenggara, masalah yang sama sudah dibahas oleh Henry Bernstein, “Kedaulatan Pangan melalui ‘Jalan Petani’: Sebuah Pandangan Skeptis” (Bernstein & Bachriadi, 2014).

Untuk pencarian kearifan lokal dalam ketahanan pangan yang penting itulah, maka penelitian ini mendapatkan momentumnya. Memang sudah banyak yang meneliti tentang kearifan lokal. Namun, kebanyakan masih berkutat di lahan pertanian yang masih murni, seperti di tepi pegunungan atau yang memang betul-betul perdesaan. Kajian Marcus J. Pattinama, “Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal: Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat” yang diterbitkan di Jurnal *Makara*, Sosial Humaniora, Vol. 13 No. 1 Juli 2009 adalah salah satunya. Demikian juga halnya dengan studi Eko Setiawan, “Kearifan Lokal

Pola Tanam Tumpangsari di Jawa Timur,” yang dimuat dalam *Jurnal Agrovigor* Vol. 2 No. 2 September 2009.

Penelitian terhadap budaya pertanian di tengah himpitan budaya perkotaan seperti di Sumedang Selatan ini memang sesuatu yang boleh jadi baru. Demikian karena di wilayah tersebut, pertanian masih ada; walaupun sudah mulai terdesak oleh alih fungsi lahan menjadi permukiman, wilayah perdagangan, dan bahkan pembangunan jalan dan perkantoran. Lalu kenapa masih ada yang bertani? Bagaimana mereka bertahan hidup? Inilah hal-hal yang dapat dijawab oleh penelitian ini.

Demikian pula, karena apa yang dituju dalam penelitian ini adalah pola hidup petani, sehingga penelitian ini bersifat holistik dalam hal ketahanan pangan; tidak secara sebagian-sebagian. Selama ini, penelitian lebih banyak melihat secara makro mengenai bagian-bagian dari pola-pola tersebut. Ada yang lebih menekankan pada pola produksi seperti studi Eko Setiawan (2009) di atas. Ada pula yang lebih menekankan pola distribusi, seperti kajian Agustian dan Mayrowani, “Pola Distribusi Komoditas Kentang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat,” yang dimuat dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1 Juni 2008.

Dengan demikian, kebaruannya ada pada prinsip mikro-fenomenologis, yaitu bagaimana petani menceritakan diri mereka pada masalah yang dihadapi mereka sendiri, tidak dilihat dari luar atau secara makro. Kemudian dari segi wilayah yang dikaji adalah wilayah perdesaan yang tergerus oleh kemajuan wilayah perkotaan. Demikian juga, yang unik dari penelitian ini adalah dalam hal holisme permasalahan, yaitu pola hidup secara keseluruhan, tidak sebagian-sebagian, yang menguatkan ketahanan pangan di tingkat petani itu sendiri.

Terakhir, yang dapat dikatakan fenomenal dari penelitian ini adalah upaya perbandingannya, antara pertanian tradisional dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam upaya modernisasi. Yaitu bahwa penelitian ini membandingkan antara petani yang tumbuh dengan sendirinya dengan apa yang digembleng dalam manajemen modern dalam suatu program yang bernama Agropolitan, yang dalam hal ini adalah di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Tentu saja hal ini bisa

dijadikan ukuran, sejauhmana pemerintah mendekati diri dengan kearifan lokal petani; begitu pula dapat dicari sejauhmana petani yang tumbuh dengan sendirinya disertai dengan desakan sekelilingnya dapat mendekati pola budaya pertanian yang dicontohkan dengan model Agropolitan; apa hambatan-hambatan akulturasinya; sekaligus dicari apa keuntungan-keuntungannya untuk masyarakat banyak.

## **B. Kerangka Berpikir**

### **1. Ketahanan Pangan**

Pertemuan puncak dunia tentang pangan (World Food Summit) 1996 mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai kondisi di mana semua manusia pada setiap saat memiliki akses terhadap makanan yang cukup, bergizi dan aman untuk menjaga kesehatan dan kehidupan yang aktif (FAO, 2008). Ketahanan pangan di Indonesia didefinisikan dalam UU No 7/1996 dan PP No. 68 tahun 2002 sebagai: “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.” Pengertian pangan dalam UU dan PP tersebut adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.” Jika diklasifikasikan, ketahanan pangan dibangun di atas tiga pilar utama yaitu:

1. Ketersediaan pangan: jumlah pangan yang tersedia secara cukup, konsisten dan berkelanjutan.
2. Akses terhadap pangan: Adanya sumber pangan yang dapat diakses untuk memberikan pangan yang layak untuk diet yang bergizi.
3. Pemanfaatan pangan (konsumsi): pemanfaatan yang tepat berdasarkan pengetahuan tentang nutrisi dan kesehatan, termasuk ketercukupan air dan sanitasi.

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan dengan baik sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu.

Menurut UU No. 7/1996 tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. Di Indonesia pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban moral, sosial, maupun hukum, termasuk hak asasi setiap rakyat Indonesia. Undang-undang tentang Pangan tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar no. 4 di dunia (pada tahun 2010 berjumlah 239,871 juta jiwa) dengan laju pertumbuhan penduduk di kisaran 1,2 atau 1,3% per tahun. Penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 337 juta jiwa di tahun 2050, sehingga upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Produksi pangan nasional perlu secara signifikan ditingkatkan agar kebutuhan domestik dapat dipenuhi.

Pengembangan pangan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah baik ditinjau dari jenis maupun kedalaman permasalahan. Pendekatan sistem pengembangan pangan, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan *off-farm*, baik pada tingkat hulu (sub-sistem pengadaan input faktor) maupun tingkat hilir (sub-sistem pengolahan dan pemasaran) tidak lebih sederhana dengan permasalahan yang dihadapi pada sub-sistem budidaya (*on-farm*). Demikian pula, permasalahan yang dijumpai dalam sub-sistem penunjangnya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi pada semua sistem agribisnis pertanian secara simultan berpengaruh pada kinerja industri pertanian. Pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melanjutkan revitalisasi pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam

(Adimihardja, 1999). Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pangan impor. Di sinilah diperlukannya kita kembali kepada warisan nenek moyang yang sudah menjadi adat istiadat, yang kemudian disebut sebagai kearifan lokal, yaitu kearifan lokal kaum petani yang menjadi produsen utama penyediaan pangan.

## **2. Lembaga Perdesaan**

Strategi pembangunan perekonomian rakyat di perdesaan dapat ditempuh antara lain dengan pengembangan kelembagaan lokal pendukung, pengembangan pertanian rakyat berkebudayaan industrial, pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat, atau pengembangan teknologi tepat guna dan bersifat spesifik lokal. Ada tiga pilar utama kelembagaan sebagai pendukung kehidupan masyarakat di perdesaan yaitu: kelembagaan yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal atau tradisional (*voluntary sector*), kelembagaan pasar (*private sector*), dan kelembagaan politik dalam pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*).

Kelembagaan komunitas lokal-tradisional perlu ditransformasikan ke arah kelembagaan komunitas lokal yang maju dan responsif terhadap perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan teknologi (tradisional-modern), sektoral (pertanian-industri), maupun tata-nilai yang hidup dalam masyarakat (budaya pertanian tradisional-pertanian-industrial).

Kelembagaan pasar atau *private* dapat menciptakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang punya jiwa kewirausahaan tinggi, ulet, tidak mengenal lelah, dan dinamis dalam mengikuti perubahan dinamika pasar. Sementara itu, kelembagaan pemerintah lokal atau kelembagaan politik dalam sistem pengambilan keputusan haruslah dapat diarahkan pada kelembagaan politik di tingkat lokal yang handal. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lokal dapat mengakses terhadap sistem pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota sebagai unit otonom yang lebih tinggi. Pada gilirannya masyarakat lokal di perdesaan mempunyai akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya di

wilayahnya sehingga pemanfaatan dan pemeliharaannya bisa lebih optimal sesuai jiwa desentralisasi pembangunan.

Pembangunan pertanian yang telah dilakukan selama ini pada hakikatnya adalah pertanian yang sebagian bersifat adaptif terhadap lingkungan yang sudah mapan. Contohnya adalah pengembangan tanaman padi dengan menggunakan input produksi seperti bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan dalam kondisi lingkungan sawah yang sudah siap dan menyatu dengan budaya masyarakatnya. Revolusi Hijau sukses karena dilandasi penguasaan teknologi budidaya disertai dengan penyiapan kelembagaan pendukungnya, sehingga dapat berjalan cepat dan diadaptasi secara luas oleh masyarakat perdesaan. Dalam upaya pengembangan pertanian rakyat di masa depan, selain penyediaan, diseminasi, pengembangan, serta pemanfaatan teknologi budidaya; juga perlu pendalaman teknologi pada aspek pasca panen, pengolahan, serta distribusi dan pemasarannya.

Sejalan dengan proses transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, atau dari masyarakat tradisional-subsisten ke arah masyarakat modern-komersial; maka perlu transformasi dari pertanian rakyat dengan budaya lokal-tradisional ke arah pertanian rakyat dengan budaya industrial. Beberapa ciri pertanian-industrial seperti yang dikemukakan oleh Sasmita (1996), antara lain adalah: (1) Ilmu dan pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan (bukan intuisi atau kebiasaan); (2) Kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan sumberdaya; (3) Mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa; (4) Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumberdaya; (5) Kualitas dan mutu merupakan orientasi dan tujuan para pelaku; (6) Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dijalankan; dan (7) Perekayasaan harus menggantikan ketergantungan pada alam, sehingga setiap produk yang dihasilkan bersifat standar baik dalam mutu, jumlah, bentuk, rasa, dan sifat-sifat lainnya, dan dengan ketepatan waktu.

Paradigma lama komunikasi pembangunan sejalan atau mendasarkan diri pada paradigma pembangunan lama yang lebih mengutamakan pertumbuhan dan menganggap akan terjadi “*trickle down effect*” terhadap hasil-hasil pembangunan.

Aliran pemikiran paradigma lama komunikasi pembangunan ini dipelopori oleh Lerner dan Schramm dan berkembang di tahun 1960-an. Dalam paradigma lama komunikasi pembangunan, komunikasi massa dianggap memainkan peranan penting dalam pembangunan, khususnya dalam penyampaian pesan yang persuasif dan informatif dari pemerintah kepada masyarakat secara hirarkis ke bawah (Rogers, 1976).

Menurut paradigma lama komunikasi pembangunan ini, media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bahkan hampir dapat dikatakan sebagai *independent variable* atau variabel bebas. Karena kekeliruannya itu maka paradigma ini banyak mendapat kritik antara lain dari Rogers yang mengemukakan bahwa paradigma ini: (1) Kurang memiliki perhatian terhadap isi media. Padahal isi media bukanlah penyebab satu-satunya dari perubahan yang ada di masyarakat. (2) Perlunya perubahan struktur sosial di samping adanya komunikasi.

Sementara itu, Daniel Lerner mengemukakan kritiknya terhadap pandangan paradigma lama komunikasi tentang peranan media massa sebagai berikut: (1) Media massa justru berpotensi untuk memperlebar kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Pesan yang disampaikan media massa cenderung diarahkan bagi masyarakat golongan menengah ke atas, akibatnya yang mengambil keputusan adalah golongan tersebut, dan golongan bawah tetap tidak mendapat keuntungan. (2) Media massa justru meningkatkan frustrasi pada masyarakat golongan bawah karena tidak mampu meraih kondisi seperti yang tampak pada media massa. (3) Media massa ternyata bukan variabel bebas tetapi lebih merupakan variabel terikat, karena ternyata masyarakat pun bersikap selektif terhadap pesan media sehingga teori peluru tidak berlaku.

Rogers kemudian mengemukakan alternatif bahwa media massa itu harus dijadikan sebagai proses komunikasi dua arah yang bersifat dialogis.

Paradigma lama komunikasi pembangunan memiliki dua varian, yaitu:

1) Pendekatan efek komunikasi

Melalui pendekatan ini media massa dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap khalayaknya. Pandangan ini muncul berdasarkan pemahaman pada

masyarakat modern yang mengalami pemudaran realitas tradisional, ketidakpastian norma dan nilai sehingga pada derajat tertentu memunculkan gejala anomik. Pada saat anomik inilah media massa memberi kepastian bentuk baru baik dalam nilai, norma, perilaku, ide dan sebagainya. Dalam keadaan tidak menentu itu pulalah media massa mengarahkan menuju arah tertentu sehingga dikatakan bahwa media massa membentuk proses pembangunan dalam mendukung konsolidasi terciptanya masyarakat modern.

Pendekatan ini menghasilkan satu teori hubungan media massa dengan masyarakat yaitu *bullet theory* (teori peluru). Teori inilah yang kemudian menjadi titik tolak perumusan kebijaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada paradigma lama komunikasi pembangunan.

## 2) Pendekatan Difusi Inovasi

Komponen-komponen yang mendasari pendekatan difusi inovasi adalah:

- a) Inovasi sebagai ide baru, berasal dari luar dan diterima oleh suatu kelompok masyarakat.
- b) Proses komunikasi untuk menyampaikan ide tersebut pada kelompok-kelompok tertentu.
- c) Adanya sebuah kelompok sasaran.
- d) Adanya rentang waktu tertentu yang dibutuhkan untuk penyebaran ide-ide baru.

Target dari difusi inovasi ini adalah individu yang akan melewati lima proses menuju ke penerimaan: (a) Munculnya kesadaran (*awareness stage*), (b) Munculnya ketertarikan (*interest stage*), (c) Proses evaluasi (*evaluatif stage*), (d) Percobaan (*trial*), dan (e) Proses adopsi (*adoption*).

Dalam proses ini peranan *opinion leader* sangat besar. Rogers dan Shoemaker mengatakan bahwa kelebihan *opinion leader* adalah sebuah tingkatan di mana seseorang dapat secara informal mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain dalam suatu cara yang diharapkan dengan frekuensi yang relatif (Siregar, 1990). Ciri-ciri dari *opinion leader* ini antara lain lebih terbuka untuk menghadapi komunikasi dengan pihak luar, lebih bersifat kosmopolit, memiliki status lebih tinggi, dan lebih bersifat inovatif dibanding orang lain (Siregar, 1990).

Menurut Astrid S. Susanto (1985), komunikasi sosial adalah kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu integrasi sosial sehingga bentuk komunikasi ini *lebih intensif* daripada komunikasi massa karena komunikator dan komunikan perlu seia dan sependapat tentang bahan/materi yang akan dibahas dalam kegiatan komunikasi yang akan dilangsungkan. Komunikasi sosial akan berhasil bila kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu proses komunikasi ini menganggap ada manfaatnya untuk mengadakan komunikasi tersebut. Senada dengan pendapat tadi, jika dilihat dari obyek kajian ilmu komunikasi yang berlandaskan pada karakteristik media, menurut Schramm dan Porter (dalam Siregar, 1990) adalah setidaknya-tidaknya memerlukan 2 orang yang bersama-sama terlibat dalam hubungan berbagi informasi pada serangkaian tanda-tanda informasional.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pihak-pihak dalam proses komunikasi sosial tersebut memungkinkan mereka untuk “*sharing*” informasi, termasuk informasi mengenai pembangunan perdesaan. Sedangkan media dari komunikasi sosial disebut sebagai media sosial, yakni media yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat (Siregar, 1990). Karena media ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka media ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Sebuah komunitas pada dasarnya membutuhkan media sosial. Misalnya ketika tidak terdapat media massa dalam masyarakat, bukan berarti masyarakat tidak memiliki saluran-saluran yang dapat digunakan sebagai penyebarluasan informasi. Lalu media apa yang muncul dalam masyarakat untuk mengekspresikan diri? Di sinilah muncul media sosial yang menggunakan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi. Media sosial ini bentuknya bisa beragam. Media sosial akan berhimpit dengan aspek-aspek adat, ritual, religius, dsb. Oleh karena itu media sosial ini sangat diperlukan dalam kondisi: ingin melibatkan individu dalam komunitas atau media massa belum dikenal dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk media sosial antara lain: 1) wayang, 2) arisan, 3) pasar malam, 4) lenong, 5) tahlilan, 6) dsb.

Media sosial bisa difungsikan pada suatu komunikasi yang bersifat kontemporer, ataupun seperti komunikasi tradisional yang turun-temurun. Media sosial berfungsi pada saat informasi yang disampaikan sesuai dengan pola-pola yang ditentukan. Keberadaan media sosial dalam masyarakat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya pola yang spesifik dalam pemanfaatannya. Hal ini erat kaitannya dengan pola-pola tertentu pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat. Dan pola-pola tersebut berkaitan dengan kebutuhan akan informasi.

Informasi sebagai salah satu unsur dalam proses komunikasi dapat dikatakan memegang peran kunci. Keberadaannya merupakan tonggak bagi munculnya fenomena komunikasi dalam interaksi antar individu. Proses komunikasi berlangsung ketika individu berorientasi terhadap serangkaian tanda-tanda informasional. Artinya, hubungan antara individu yang satu dengan lainnya dikatakan sebagai hubungan komunikatif bilamana dalam hubungan tersebut mengalir informasi. Berangkat dari informasi inilah karakteristik media sosial dapat dilacak.

Kalau kita melihat kondisi sekarang (komunikasi kontemporer) adalah bagaimana menempatkan komunikasi sosial dalam komunikasi pembangunan. Informasi-informasi pembangunan tidak mudah disampaikan kepada masyarakat dan bukan karena masyarakatnya yang terlalu kritis, tetapi karena masyarakat tidak mempunyai media sosial. Penyampaian pesan yang begitu luas membutuhkan media-media lain supaya bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Berikut adalah perbandingan komunikasi pembangunan (Siregar, 1990):

Tabel 2.1. Perbandingan Komunikasi Pembangunan

<i>Development communication</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersifat makro, yaitu bagaimana membangun media massa. Sebab salah satu tolok ukur pembangunan adalah bagaimana media massa dikonsumsi oleh masyarakat.</li> </ul>
<i>Development support communication</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersifat mikro (komunikasi yang menunjang pembangunan)</li> <li>• mencoba melihat pembangunan dalam skala mikro (masyarakat-masyarakat lokal) dengan menggunakan media yang tumbuh dalam masyarakat dan mencoba menempatkan individu pada harkat dan martabat</li> </ul>

manusia.
----------

Komunikasi sosial juga menggunakan jalur non-media massa yang memungkinkan integrasi masyarakat terbentuk. Suatu kegiatan ritual tidak menutup kemungkinan untuk membangun komunikasi horizontal, bukan hanya yang vertikal, dalam hal mempersatukan warga komunitas. Jadi ada aspek ritual yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial.

Ciri-ciri masyarakat perdesaan biasanya diidentikkan dengan sistem sosial yang bersifat tradisional. Banyak literatur yang membahas tentang hal tersebut, antara lain Rogers dan Shoemaker yang mengungkapkan 6 point, yakni: (1) Kurang berorientasi pada perubahan. (2) Kurang maju dalam teknologi atau masih sederhana. (3) Relatif rendah kemelekhurufan, pendidikan dan pemahaman masyarakatnya terhadap metode ilmiah. (4) Hubungan interpersonal masih sangat efektif. (5) Sedikit sekali komunikasi yang dilakukan oleh anggota sistem dengan pihak luar. (6) Kurang mampu menempatkan diri atau melihat dirinya dalam peranan orang di luar sistem (Hanafi, 1987).

### **3. Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah sistem pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat lokal dalam berusaha tani. Dalam konteks ketahanan pangan, para petani memandang kearifan lokal identik dengan pangan lokal dalam sistem pertanian subsisten seperti padi ladang, jagung, ubi, pisang dan lain-lain. Sebab, mereka menanam, memelihara tanaman lokal tidak terlepas dari penerapan pengetahuan serta nilai kearifan lokal yang mereka warisi secara turun temurun.

Ketika nilai-nilai tersebut tercerabut dari akar budaya berusaha tani, maka mereka tidak memiliki kekuatan dalam kehidupan khususnya dalam berusaha tani. Mereka menjadi terasing dengan budayanya sendiri (berusaha tani) sementara budaya baru –dalam kemasan teknologi baru dalam berusaha tani maju seperti penggunaan benih/bibit hibrida dan sebagainya—belum mampu mereka kuasai.

Ke depan komoditi beras menjadi komoditi yang sulit diperoleh masyarakat kecil karena harganya yang terus naik. Laporan IRRI di Philipina menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ke depan dunia akan mengalami krisis pangan (beras) hebat dan jutaan manusia akan mati kelaparan terutama konsumen beras. Sebab, sumber air irigasi akan menurun bahkan mengering, produksi beras akan menurun sekitar 10% setiap kenaikan suhu 1 derajat Celsius pada malam hari, beberapa negara penghasil beras tidak tertarik lagi menanam padi, sebaliknya negara di Asia Selatan dan Afrika yang sebelumnya mengkonsumsi gandum beralih ke beras.

Oleh karena itu, kampanye ‘kedaulatan pangan’ berbasis kearifan lokal harus secara serius digalakkan terutama pangan non beras yaitu agar petani dan masyarakat kembali mencintai pangan lokal. Jika hal tersebut berhasil maka masyarakat tidak hanya tergantung pada beras, karena masih ada pangan lokal yang dimiliki petani.

Gerakan mewujudkan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal memiliki beberapa arti strategis seperti; 1) untuk meningkatkan citra makanan lokal sebagai substitusi beras dan diversifikasi pangan, 2) upaya untuk melestarikan semua potensi lokal yang diwarisi para leluhur di seluruh negeri ini, 3) mengajak masyarakat terutama generasi muda mencintai kebudayaan sendiri dan mengerti kearifan lokal yang dimiliki oleh leluhurnya sendiri, 4) membangun berbasis ‘*back to basic*’ yang berwawasan alam dan lingkungan hidup, dan 5) mengantisipasi kelangkaan beras sebagai akibat dari pemanasan global. Jika beras menjadi komoditi yang sulit didapat –baik karena harga terlalu mahal atau kekurangan stok karena perubahan iklim ekstrim—maka tanaman lokal dapat menjadi salah satu produk yang mampu mengatasinya.

Kearifan lokal ini dapat dibagi ke dalam kearifan individual dan kearifan komunal. Kearifan individual adalah adat istiadat yang sudah menjadi perilaku individu dalam kehidupan kesehariannya. Sebegitu seringnya dilakukan, sehingga sudah menjadi berurat berakar dalam menjalankan kehidupan, atau sudah menjadi otomatis. Kearifan komunal adalah kearifan yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kesatuan sosial. Baik kearifan individual maupun kearifan komunal

di sini adalah merupakan kearifan dari budaya pertanian yang sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga menjadi kearifan lokal petani setempat. Dengan semua kearifan itu, disinyalir dapat memecahkan masalah ketahanan pangan, baik dalam segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua itu ditujukan pertama kali adalah untuk kelangsungan (*survival*) kehidupan para petani itu sendiri. Namun, dengan suksesnya mereka melayani diri mereka sendiri, maka itu sudah merupakan suatu sumbangan bagi ketahanan pangan masyarakat. Dari situlah, kemudian, ketahanan pangan di tingkat nasional pun dapat tercipta. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram 1 di bawah ini.

#### **4. Pola Pertanian**

Menurut Sanganatan (1989) bahwa istilah umum “pertanian” berarti kegiatan menanami tanah dengan tanaman yang nantinya menghasilkan suatu yang dapat dipanen, dan kegiatan pertanian merupakan campur tangan manusia terhadap tetumbuhan asli dan daur hidupnya. Dalam pertanian modern campur tangan ini semakin jauh dalam bentuk masukan bahan kimia pertanian, termasuk: pupuk kimia, pestisida, dan bahan pembenah tanah lainnya. Bahan-bahan tersebut mempunyai peranan yang cukup besar dalam meningkatkan produksi tanaman. Akan tetapi dua istilah “pertanian alami” dan “pertanian organik” kita kaji lebih mendalam, maka pengertiannya akan berbeda.

Istilah yang pertama “pertanian alami” mengisyaratkan kekuatan alam mampu mengatur pertumbuhan tanaman, sedang campur tangan manusia tidak diperlukan sama sekali. Istilah yang kedua “pertanian organik” campur tangan manusia lebih insentif untuk memanfaatkan lahan dan berusaha meningkatkan hasil berdasarkan prinsip daur-ulang yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat (Sutanto, 1997). Pertanian adalah salah satu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ada anggapan bahwa asal mula pertanian di dunia dimulai dari Asia Tenggara. Awal kegiatan pertanian terjadi ketika manusia mulai mengambil peranan dalam proses kegiatan tanaman dan hewan serta pengaturannya untuk memenuhi kebutuhan.

Tingkat kemajuan pertanian mulai dari pengumpulan dan pemburuan, pertanian primitif, pertanian tradisional, dan pertanian modern (Admin UPI, 2012).

Sedangkan menurut Banoewidjojo (1983) pertanian dalam arti luas yaitu semua kegiatan usaha dalam reproduksi fauna dan flora tersebut, yang dibedakan ke dalam 5 sektor, masing-masing pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dalam arti sempit, pertanian berarti khusus pertanian rakyat.

Pertanian merupakan bagian agro-ekosistem yang tak terpisahkan dengan sub-sistem kesehatan dan lingkungan alam, manusia dan budaya saling mengait dalam suatu proses produksi untuk kelangsungan hidup bersama (Karwan A. Salikin).

Sektor pertanian merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional dirasakan akan semakin penting dan strategis. Hal tersebut dikarenakan sektor pertanian tidak terlepas dan sejalan dengan arah perubahan dan dinamika lingkup nasional maupun internasional (Departemen Pertanian, 2010).

Dalam satu abad terakhir jumlah penduduk dunia telah meningkat secara eksponensial dan diperkirakan mencapai angka 8,3 miliar menjelang tahun 2025. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan lahan untuk pemukiman dan aktifitas industri meningkat, sehingga memaksa manusia berusaha tani pada lahan yang marginal. Guna memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk dunia yang diproyeksikan terus meningkat ini, produksi rata-rata tanaman sereal harus meningkat setidaknya 80 persen hingga tahun 2025 (Zulkarnaen, 2009).

Di lain pihak, hampir seluruh lahan pertanian di dunia telah menurun secara drastis secara kualitas ekosistem dikarenakan oleh sistem pertanian terdahulu yang disebut dengan sistem pertanian tradisional dan Revolusi Hijau atau sistem pertanian konvensional. Diperlukan suatu strategi pertanian khusus untuk bisa tetap bertahan agraris, yakni pertanian berkelanjutan.

Definisi komprehensif bagi pertanian berkelanjutan meliputi 3 fungsi dasar pembangunan pertanian berkelanjutan. Fungsi tersebut adalah fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi ekologi. Fungsi tersebut direpresentasikan dengan sistem

pertanian yang melaksanakan pengurangan input bahan-bahan kimia dibandingkan pada sistem pertanian tradisional, erosi tanah terkendali, dan pengendalian gulma, memiliki efisiensi kegiatan pertanian (*on-farm*) dan bahan-bahan input maksimum, pemeliharaan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi tanaman, dan penggunaan dasar-dasar biologi pada pelaksanaan pertanian.

Salah satu pendekatan pertanian berkelanjutan adalah input minimal (*low input*). Penggunaan input minimal dalam pendekatan berkelanjutan pada sistem pertanian digunakan dengan alasan bahwa pertanian itu sendiri memiliki kapasitas internal yang besar untuk melakukan regenerasi dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya internal (Departemen Pertanian, 2010).

Tujuan dari *sustainable agriculture* adalah peningkatan daur ulang secara alami untuk memaksimalkan input menggunakan bahan-bahan organik. Konsep pertanian berbasis ekologi telah berkembang pesat sejalan meningkatnya taraf hidup dan kesadaran lingkungan. Sistem pertanian ekologis (*sustainable agriculture*) yang dikembangkan antara lain LISA (*low input sustainable agriculture*), pertanian ekologis terpadu (*integrated ecological farming system*), dan pertanian organik (*organic farming system*) (Zulkarnaen, 2009).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertanian berkelanjutan, diperlukan perbedaan fungsi dan contoh dari setiap sistem pertanian, baik sistem pertanian tradisional, maupun sistem pertanian konvensional.

Pertanian merupakan basis negara agraris seperti Indonesia. Pertanian merupakan sentral utama penghidupan negara Indonesia. Pertanian tradisional adalah salah satu model pertanian yang masih sangat sederhana dan merupakan perkembangan pertanian yang masih sangat sederhana dengan pola masyarakat yang serba kurang menerima teknologi. Pertanian tradisional merupakan buntut dari pertanian zaman pra-sejarah yang mulai mengalami peningkatan pola pikir dari sebelumnya *huma* (ladang berpindah) menjadi pertanian menetap.

Sistem pertanian tradisional adalah sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Sistem pertanian tradisional salah satu contohnya adalah sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah

telah tidak sejalan lagi dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat akibat bertambahnya penduduk.

Sistem pertanian Revolusi Hijau juga dikenal dengan sistem pertanian yang konvensional. Program Revolusi hijau diusahakan melalui pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas baru yang melampaui daerah adaptasi dari varietas yang ada. Varietas tanaman yang dihasilkan adalah yang responsif terhadap pengairan dan pemupukan, adaptasi geografis yang luas, dan resisten terhadap hama dan penyakit. Gerakan ini diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation, yang mengembangkan gandum di Meksiko (1950) dan padi di Filipina (1960). Revolusi hijau menekankan pada tanaman serelia seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain.

Gagasan tersebut telah merubah wajah pertanian dunia, tak terkecuali wajah pertanian Indonesia. Perubahan yang nyata adalah bergesernya praktik budidaya tanaman dari praktik budidaya secara tradisional menjadi praktik budidaya yang modern dan semi-modern yang dicirikan dengan maraknya pemakaian input dan intensifnya eksploitasi lahan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari penanaman varietas unggul yang responsif terhadap pemupukan dan resisten terhadap penggunaan pestisida dan herbisida. Berubahnya wajah pertanian ini ternyata diikuti oleh berubahnya wajah lahan pertanian kita yang makin hari makin menjadi kritis sebagai dampak negatif dari penggunaan pupuk anorganik, pestisida, dan herbisida serta tindakan agronomi yang intensif dalam jangka panjang (Departemen Pertanian, 2010).

Data Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan tahun 1993 menunjukkan bahwa luas lahan bermasalah sudah mencapai sekitar 18,4 juta ha dengan rincian 7,5 juta ha potensial kritis; 6,0 juta semi-kritis; 4,9 juta ha kritis. Bila diasumsikan, laju penggundulan hutan sekitar 2-3 juta ha pertahun dan ditambah dengan lahan bekas tambang maka luas lahan kritis di Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 30-40 juta hektar (Zulkarnaen, 2009).

Keadaan tersebut akan semakin parah karena adanya konversi lahan ke nonpertanian, pengrusakan hutan yang mencapai 25 ha permenit atau 2 juta ha per tahun. Selain itu, pemakaian berbagai senyawa xenobiotika seperti pestisida

dan fungisida berlangsung secara intensif dalam merusak lingkungan antara 300.000 – 600.000 hektar per tahun. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan juga menyebabkan lahan menjadi kritis. Berdasarkan hasil kajian Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, sebagian lahan pertanian di Indonesia memiliki kandungan C-organik kurang dari 1%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anorganik dengan dosis berapa pun tidak akan meningkatkan produksi (Zulkarnaen, 2009).

Adanya dinamika tersebut menyebabkan munculnya ide untuk mengembangkan suatu sistem pertanian yang dapat bertahan hingga generasi berikutnya dan tidak merusak alam. Dalam dalam dua dekade terakhir telah mulai diupayakan metode alternatif dalam melakukan praktik pertanian yang dinilai berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*environmentally sound and sustainable agriculture*). Salah satu caranya adalah menggunakan konsep pertanian berkelanjutan (Departemen Pertanian, 2010).

Pertanian berkelanjutan atau pembangunan pertanian berkelanjutan pertama kali menjadi pembicaraan dunia pada tahun 1987, tahun 1992 diterima sebagai agenda politik oleh semua negara di dunia sebagaimana dikemukakan dalam Agenda 21, Rio de Janeiro. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangka panjang dapat dilakukan bila dikaitkan dengan masalah perlindungan lingkungan. Pertemuan Johannesberg, Afrika Selatan (2-4 September 2002) yang merupakan Pertemuan Puncak Pembangunan Berkelanjutan ("World Summit On Sustainable Development") menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan pandangan dan penanganan jangka panjang dengan partisipasi penuh semua pihak. Secara jelas dinyatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang. Di bidang pertanian diterapkan dengan pendekatan pembangunan pertanian berkelanjutan atau berwawasan lingkungan, yang dalam pelaksanaannya sudah termasuk aspek pertanian organik.

Pertanian modern yang bertumpu pada pasokan eksternal berupa bahan-bahan kimia buatan (pupuk dan pestisida), menimbulkan kekhawatiran berupa

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sedangkan pertanian tradisional yang bertumpu pada pasokan internal tanpa pasokan eksternal menimbulkan kekhawatiran berupa rendahnya tingkat produksi pertanian, jauh di bawah kebutuhan manusia. Kedua hal ini yang dilematis ini telah membawa manusia kepada pemikiran untuk tetap mempertahankan penggunaan masukan dari luar sistem pertanian itu, namun tidak membahayakan kehidupan manusia dan lingkungannya (Mugnisjah, 2001).

Pertanian modern dikhawatirkan memberikan dampak pencemaran sehingga membahayakan kelestarian lingkungan, hal ini dipandang sebagai suatu krisis pertanian modern. Sebagai alternatif penanggulangan krisis pertanian modern adalah penerapan pertanian organik. Kegunaan budidaya organik menurut Sutanto (2002) adalah meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya kimiawi. Pemanfaatan pupuk organik mempunyai keunggulan nyata dibanding dengan pupuk kimia. Pupuk organik dengan sendirinya merupakan keluaran setiap budidaya pertanian, sehingga merupakan sumber unsur hara makro dan mikro yang dapat dikatakan cuma-cuma.

Pupuk organik berdaya ameliorasi ganda dengan bermacam-macam proses yang saling mendukung, bekerja menyuburkan tanah dan sekaligus mengkonservasikan dan menyehatkan ekosistem tanah serta menghindarkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan.

Dengan demikian, penerapan sistem pertanian organik pada gilirannya akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Dunia pertanian modern adalah dunia mitos keberhasilan modernitas. Keberhasilan diukur dari berapa banyaknya hasil panen yang dihasilkan. Semakin banyak, semakin dianggap maju. Di Indonesia, penggunaan pupuk dan pestisida kimia merupakan bagian dari Revolusi Hijau, sebuah proyek ambisius Orde Baru untuk memacu hasil produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern, yang dimulai sejak tahun 1970-an.

Gebrakan revolusi hijau di Indonesia memang terlihat pada dekade 1980-an. Saat itu, pemerintah mengkomando penanaman padi, pemaksaan pemakaian

bibit impor, pupuk kimia, pestisida, dan lain-lainnya. Hasilnya, Indonesia sempat menikmati swasembada beras. Namun pada dekade 1990-an, petani mulai kelimpungan menghadapi serangan hama, kesuburan tanah merosot, ketergantungan pemakaian pupuk yang semakin meningkat dan pestisida tidak manjur lagi, dan harga gabah dikontrol pemerintah.

Revolusi Hijau bahkan telah mengubah secara drastis hakekat petani. Dalam sejarah peradaban manusia, petani bekerja mengembangkan budaya tanam dengan memanfaatkan potensi alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

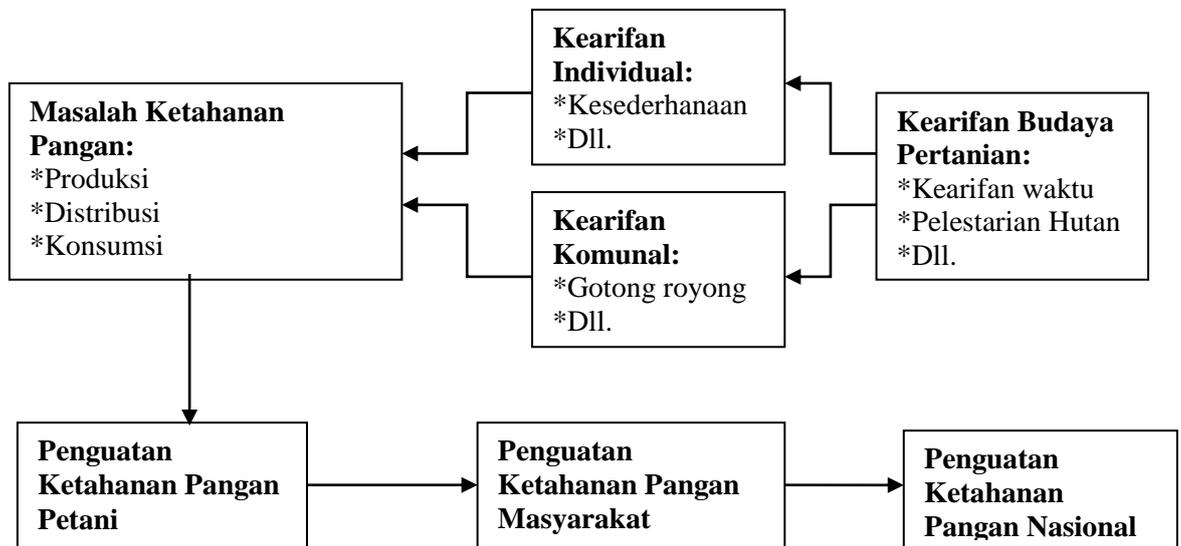
Petani merupakan komunitas mandiri. Nenek moyang memanfaatkan pupuk hijau dan kandang untuk menjaga kesuburan tanah, membiakkan benih sendiri, menjaga keseimbangan alam hayati dengan larangan adat.

Mereka mempunyai sistem organisasi sosial yang sangat menjaga keselarasan, seperti organisasi Subak di Bali dan Lumbung Desa di perdesaan Jawa. Dengan pertanian modern, petani justru tidak mandiri. Padahal, FAO (lembaga pangan PBB), telah menegaskan Hak-Hak Petani (Farmer`s Rights) sebagai penghargaan bagi petani atas sumbangan mereka. Hak-hak Petani merupakan pengakuan terhadap petani sebagai pelestari, pemulia, dan penyedia sumber genetik tanaman.

Hak-hak petani dalam deklarasi tersebut mencakup: hak atas tanah, hak untuk memiliki, melestarikan dan mengembangkan sumber keragaman hayati, hak untuk memperoleh makanan yang aman, hak untuk mendapatkan keadilan harga dan dorongan untuk bertani secara berkelanjutan, hak memperoleh informasi yang benar, hak untuk melestarikan, memuliakan, mengembangkan, saling tukar-menukar dan menjual benih serta tanaman, serta hak untuk memperoleh benihnya kembali secara aman yang kini tersimpan pada bank-bank benih internasional (Wacana, edisi 18, Juli-Agustus 1999).

Apa yang dikembangkan oleh para ilmuwan telah membedakan mana yang maju dan terbelakang, modern dan tradisional, serta efisien dan tidak efisien. Sedangkan buktinya, sistem pertanian yang disebut sebagai yang terbelakang, tradisional dan tidak efisien itu ternyata lebih bersifat ekologis, tidak merusak alam.

Diagram 1. Peta Konsep Kearifan Lokal Petani dalam Ketahanan Pangan



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif sehingga peneliti tidak hanya menggali data-data yang tampak berupa angka-angka seperti halnya pada metode kuantitatif, tetapi juga menginterpretasikan data dan mencari hal-hal di balik data disertai dengan teori-teori yang mendukungnya (Punch, 1998).

Walaupun fokus penelitian ini berada di jalur Sosiologi Fungsionalisme, untuk mendapatkan data seutuh mungkin dan untuk mendapatkan cerita sebenar mungkin dari lapangan, kajian ini menggunakan mazhab Sosiologi Interaksionisme. Oleh karena itu, teknik mendapatkan datanya dilakukan terutama melalui wawancara dan observasi (Bamberger [ed.], 2000). Ini karena bahwa titik tekannya bukanlah pada ‘hasil’ (*outcomes*), tetapi juga pada ‘proses’ (*processes*) yang diteliti, yaitu interaksi antara para petani dan pemerintah dalam proses ketahanan pangan. Di sinilah munculnya kajian analitis, yang didukung oleh penjelasan yang tepat, abstrak, realistik, dan berdasarkan tindakan (*action based*) untuk fenomena ketahanan pangan, sebagaimana telah diajukan Hedström (2005). Untuk ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan: penjelasan (*explanation*), klasifikasi dan abstraksi (*dissection and abstraction*), ketepatan dan kejernihan (*precision and clarity*), dan tindakan (*action*). Meskipun begitu, dalam melakukan ini, kajian ini terbuka pada jenis penelitian kualitatif lain seperti analisis wacana, analisis visual, analisis naratif, dan yang sejenisnya agar dapat menghindari berbagai bentuk reduksionisme fragmentaris (Atkinson & Delamont, 2005).

Penelitian mengenai ketahanan pangan petani dalam pola hidup berkearifan lokal-tradisional ini akan dilaksanakan di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang diperbandingkan dengan pola pertanian modern ala Agropolitan yang ada di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran dari penelitian ini adalah para petani di

Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

Kemudian, validitas data dalam penelitian ini akan diukur melalui triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi data ini meliputi triangulasi sumber, peneliti, metode, dan teori (Moleong, 2001).

## **B. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah petani di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Stratified Random Sampling* di mana petani di Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung akan distratifikasikan ke dalam 3 kelompok berdasarkan status kepemilikan tanah, yakni petani penggarap tanah sendiri, petani yang menggarap tanah sewa, dan petani penggarap tanah orang lain (buruh tani).

## **C. Jenis Data**

### a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan *key person*, wawancara dengan informan, serta observasi lapangan. Dalam hal ini, data primer didapat dari para petani di Sumedang Selatan dan di Ciwidey, Kabupaten Bandung.

### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari arsip, dokumen dan literatur yang sesuai dengan topik dari penelitian ini. Dalam hal ini, arsip-arsip dan dokumen yang ada di kedua lokasi tersebut di atas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data bagi penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni:

##### a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yang dianggap dapat mewakili sumber dalam proses pengumpulan data (Arikunto, 1998). Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan *key informant*, yakni orang yang dianggap paling mengetahui situasi dan kondisi obyek yang akan dijadikan sasaran penelitian, sehingga peneliti dapat menggali informasi-informasi awal yang diperlukan secara mendalam. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan para petani dengan menggunakan metode *semi structured interview* sehingga peneliti dapat memperoleh data secara mendalam.

##### b) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi (Arikunto, 1998). Dalam melakukan ini, peneliti mengamati kegiatan pertanian di lokasi penelitian dengan teliti, sebab seringkali apa yang dilihat dapat berbeda dengan apa yang dikatakan dalam wawancara.

##### c) Dokumentasi

Melalui metode ini peneliti memperoleh data sekunder dengan jalan mengumpulkan arsip, foto, dan data-data tertulis yang sesuai untuk menjawab fenomena yang diteliti. Data dari teknik dokumentasi ini didapat baik dari perorangan maupun perkantoran seperti kantor desa, kecamatan, kelompok tani, dan sebagainya.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yaitu berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berdasarkan azas penelitian kualitatif, analisis data dilakukan di lapangan dan bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Reduksi data dan sajian data

merupakan dua komponen dalam analisis data (Bamberger [ed.], 2000). Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan dianggap selesai. Jika terjadi kesimpulan yang dianggap kurang memadai, diperlukan aktivitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus. Ketiga komponen aktivitas tersebut saling berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang mantap. Hal-hal tersebut dilakukan dalam suatu siklus. Jadi apabila terjadi kekurangan, bisa kembali lagi ke lapangan untuk menutupi kekurangan tersebut. Proses analisis data tersebut dinamakan *Model Analisis Interaktif*, yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Punch, 1998).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Umum**

Paradigma lama dalam pembangunan ekonomi yang lebih mengutamakan dominasi beberapa kelompok pelaku ekonomi ternyata tidak mampu menghasilkan fundamental perekonomian yang kuat. Eksistensi para pengusaha kecil di tengah krisis ekonomi memberikan bukti bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan harus dilakukan untuk mendorong terbangunnya struktur perekonomian yang lebih tangguh dan stabil.

Di sisi lain otonomi daerah dapat mengakibatkan munculnya fenomena persaingan antar wilayah (*inter regional competition*), di mana pengukuran eksistensi suatu wilayah ditentukan berdasarkan kemampuannya menciptakan basis keunggulan wilayahnya masing-masing. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dicapai melalui:

- 1) Kesuksesan menjual produk dan jasa di dalam dan di luar daerah.
- 2) Peningkatan pendapatan daerah melalui pendapatan ekspor yang didapat dari jual beli barang dan jasa.
- 3) Keterkaitan ekonomi yang efisien antara produsen, pedagang dan pasar di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Pengembangan ekonomi terpadu di setiap wilayah atau kawasan merupakan kebutuhan suatu daerah untuk mendayagunakan seluruh potensi dan sumber daya yang dimilikinya dengan jalan memadukan antara pendekatan berorientasi kepada sumberdaya (*resources based oriented*) dan pendekatan berorientasi kepada manusia (*people centered approach*). Usaha mengembangkan ekonomi daerah dimulai dari pemetaan kebutuhan dan kesempatan pasar. Untuk mengubah cara berpikir dan membangun kepercayaan diri masyarakat, dibutuhkan pendekatan-pendekatan kepada para *stakeholder*, pengusaha kecil, perusahaan swasta, pegawai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk memberdayakan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat, diperlukan

pengembangan kapasitas yang dilakukan secara intensif, kontinyu dan komprehensif.

Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah harus mampu berperan dalam:

- 1) Pemanfaatan sumber daya lahan secara optimal,
- 2) Peningkatan produktivitas lahan,
- 3) Peningkatan peran petani dalam pengelolaan sumber daya,
- 4) Peningkatan daya saing produk pertanian,
- 5) Mekanisme yang sehat dalam penentuan harga yang mencerminkan pembagian keuntungan secara adil di antara para pelaku agribisnis.

Hal ini secara jelas terlihat pentingnya interaksi antara pembangunan ekonomi daerah dan kebijakan pemerintahan daerah. Bila tidak, harapan bahwa otonomi daerah bermakna peningkatan kesejahteraan masyarakat kemungkinan tidak akan menjadi kenyataan. Pembangunan pertanian dengan memperhatikan peran-peran tersebut akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat petani, mengurangi tingkat pengangguran yang selama ini menjadi masalah utama dalam pembangunan wilayah. Pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan penguatan sentra-sentra produksi pertanian yang berbasiskan kekuatan internal mampu berperan sebagai kawasan/kluster pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter dan intra regional.

Permasalahan pengembangan pertanian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu: (1) Lemahnya posisi tawar petani; (2) Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA); (3) Rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM); dan (4) Ketersediaan Infrastruktur Penunjang.

Keberhasilan petani dalam peningkatan produksi ternyata tidak serta merta meningkatkan pendapatan usaha tani. Nilai tambah ekonomi ternyata tidak hanya berasal dari usahatani tapi juga dari kegiatan *off-farm* nya. Paradigma pendekatan pembangunan ekonomi berbasis pertanian harus diubah, dari yang semula lebih banyak bertumpu pada pembangunan produksi (sub sistem budidaya), kepada pembangunan sistem agribisnis dimana seluruh sub-sistem agribisnis (budidaya,

sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan jasa), dibangun secara simultan dan harmonis.

Program agropolitan pada kawasan agribisnis merupakan program pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agropolitan yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Konsep agropolitan ini merupakan salah satu yang menjadi *core* pembangunan perdesaan dan pertanian di Indonesia saat ini. Sejak ditetapkannya 8 kawasan perintis agropolitan tahun 2002, konsep ini semakin dikenal oleh banyak daerah. Konsep ini semakin diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (sebagai revisi Undang-Undang 24 Tahun 1992).

Khusus untuk Kabupaten Bandung, pengembangan kawasan pertanian diprioritaskan pada kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui kegiatan:

- (1) Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditas pertanian serta produk-produk olahan pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan.
- (2) Penguatan kelembagaan petani.
- (3) Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia *agroinput*, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa).
- (4) Pengembangan kelembagaan penyuluh pembangunan terpadu.
- (5) Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi.
- (6) Peningkatan sarana dan prasarana umum.
- (7) Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.

Bagi Kabupaten Bandung, kegiatan pengembangan kawasan agropolitan diperlukan sebagai dasar perencanaan pembangunan pertanian, khususnya menyangkut keterpaduan kegiatan pembangunan infrastruktur yang mendukung

terhadap peningkatan produksi pertanian agar memiliki daya saing dan bernilai jual tinggi. Penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bandung tahun 2006, yaitu Kawasan Agropolitan Pangalengan. Pada tahun 2007 dilakukan penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan Ciwidey, yang meliputi tiga kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Ciwidey; (2) Kecamatan Pasirjambu; dan (3) Kecamatan Rancabali.

Hasil pengembangan Kawasan Agropolitan Ciwidey diharapkan dapat mewujudkan: (1) Keberimbangan pembangunan per kawasan; dan (2) Pembangunan perdesaan yang berbasis pertanian.

Dengan demikian, bagi Kabupaten Bandung, konsepsi agropolitan tersebut diharapkan dapat menjadi arahan bagi penyelenggara pengembangan agribisnis secara menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan nyata serta dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat tumbuh dan berkembang.

Pengembangan kawasan pertanian yang maju di Bandung, memang sudah banyak dirintis, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Oleh karena itu, pengembangannya pada masa sekarang hanyalah bersifat intensifikasi dan massifikasi dari usaha berterusan dari masa-masa yang sudah dilalui. Yang menjadi masalah adalah nasib para petani yang tidak dalam kondisi pengembangan. Di sini para petani seperti 'ayam kehilangan induknya.' Bahkan kondisi pertanian pun terancam oleh berbagai hal seperti alih fungsi lahan, pembangunan perkotaan, dan sebagainya. Inilah kondisi wilayah lain di Jawa Barat selain Kawasan Agropolitan Ciwidey, Kabupaten Bandung, seperti daerah Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

Dalam hal Kecamatan Sumedang Selatan, kondisi pertanian berjalan secara alamiah dan tradisional. Demikian karena pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang lebih fokus pada daerah-daerah yang memang mempunyai produk-produk unggulan dan lahan-lahan yang masih memadai untuk usahatani, yang juga sudah sedari dulunya begitu; dengan demikian tinggal mengembangkan saja. Berikut bagaimana dominasi daerah lain terhadap usahatani dan usaha terkait lainnya dibandingkan dengan Sumedang Selatan.

Didominasi oleh daerah pegunungan, membuat daerah Sumedang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup menjanjikan. Bahkan sebagian besar penduduk Sumedang menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka sehari-hari. Jumlah produksi padi di Kecamatan Buahdua, Conggeang, Jati Gede dan Tomo, mencapai 408.643 ton pada tahun 2006. Sumedang juga menghasilkan palawija seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kedelai dan kacang tanah untuk mencukupi kebutuhan lokal dan beberapa daerah lainnya di sekitar kabupaten tersebut. Disamping itu, beberapa daerah di Kabupaten Sumedang juga kaya akan sayuran dan buah-buahan. Mulai dari cabe merah, bawang merah, cabe rawit, kubis, ketimun, sampai aneka macam buah-buahan segar, tersebar di berbagai kecamatan sehingga tidak heran bila sebagian besar masyarakat mulai memanfaatkan potensi tersebut untuk mendatangkan untung besar setiap bulannya.

Dalam hal usaha kuliner, daerah Sumedang memiliki beranekaragam makanan khas yang diminati masyarakat lokal, nasional, bahkan internasional. Produk unggulannya tahu sumedang bahkan sudah menjadi buah tangan wajib bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Selain itu, ada juga ubi cilembu yang manis dan pulen dibudidayakan di Kecamatan Tanjungsari, sale pisang yang diproduksi masyarakat Panyingkiran di daerah kota Sumedang, salak Cipondoh yang mulai dibudidayakan masyarakat Desa Bongkok Kecamatan Congeang, serta sawo Citali yang menjadi produk unggulan Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Sumedang.

Dalam hal peternakan, di Sumedang, hewan ternak yang dikembangkan masyarakat antara lain sapi pedaging, sapi perah, kerbau, kuda, domba, serta hewan unggas (seperti ayam buras, itik, dan lain-lain). Populasi sapi Sumedang mencapai 29.840 ekor dan tersebar di Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, dan Pamulihan. Sedangkan untuk domba banyak ditemukan di daerah Cimanggu dan Pamulihan.

Pada kenyataannya, Kecamatan Sumedang Selatan, merupakan tempat terdapatnya sebagian besar kantor pemerintahan Kab Sumedang, mulai dari Gedung Pemkab, DPRD, dan gedung dinas lainnya. Di Kecamatan Sumedang

Selatan terdapat banyak wilayah Pariwisata, mulai dari wisata kuliner hingga wisata alam. Selain itu juga terdapat tempat-tempat bersejarah selama masa pendudukan Belanda dan Jepang, antara lain Benteng Gunung Kunci, Benteng Palasari yang berada di puncak Gunung Palasari, serta bekas tangsi yang kini menjadi KODIM 0610 Sumedang. Tambahan pula, Sumedang Selatan adalah jalur perlintasan Bandung-Cirebon dan dekat dengan pusat kota Sumedang. Oleh karena itu, usahatani merupakan hal yang cukup terdesak oleh intensnya derap pembangunan.

Walaupun begitu, kondisi perbukitan dengan sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya dapat dijadikan tempat pertanian yang cukup produktif. Tidak heran jika kemudian, pertanian masih tetap dominan di Sumedang Selatan.

## **B. Hasil Penelitian**

Sebelum peneliti menemui calon informan, terlebih dahulu menemui tokoh masyarakat sebagai *key informant*. Untuk di Sumedang Selatan, para informan kunci itu adalah Timbul dan Ihsan yang masing-masing berprofesi sebagai Sekretaris Kecamatan dan seorang ulama. Sedangkan untuk di Ciwidey, mereka adalah Asep dan Komar; masing-masing sebagai pegawai kecamatan dan pedagang selai strawberry. Para tokoh masyarakat tersebut dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih baik mengenai seluk-beluk perdesaan mereka masing-masing dibanding warga lainnya sehingga akan mempermudah peneliti dalam mendapatkan gambaran mengenai kondisi perdesaan secara keseluruhan misalnya mengenai sejarah dan kondisi geografis, demografis, status sosial ekonomi desa, fasilitas desa, media sosial, serta waktu yang tepat untuk menemui calon informan.

Demikian itu karena tokoh masyarakat biasanya adalah orang-orang yang menjadi tempat bertanya dan meminta nasihat anggota masyarakat lainnya. Mungkin mereka menduduki jabatan formal, tetapi pengaruh yang dimiliki berlaku secara informal, bukan karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi kepemimpinan mereka bukan diperoleh karena jabatan resminya, tapi karena kemampuan dan hubungan antar pribadinya dengan anggota masyarakat

(Rogers & Shoemaker, 1986). Biasanya para pemuka masyarakat ini lebih terbuka dan terjangkau dengan dunia luar, lebih bersifat kosmopolit, mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi, serta lebih maju dan bergagasan, meskipun dalam hal ini sangat tergantung dari sifat-sifat pribadi seseorang (Assegaf, 1987).

Setelah melakukan wawancara dengan *key informant*, peneliti mengadakan wawancara dengan petani (penduduk yang bermata pencaharian utama di bidang pertanian) serta melakukan observasi guna melihat/mengecek secara langsung informasi awal yang diberikan oleh *key informant*, dan mencari data yang belum dapat tergalikan dari *key informant* tersebut. Dalam penelitian lapangan yang kurang lebih dilaksanakan selama 4 bulan, peneliti menemui 20 orang informan. Kesulitan utama ketika wawancara dengan informan adalah peneliti harus menterjemahkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sehingga dapat dimengerti oleh para informan. Hal ini terjadi karena sebagian besar informan berpendidikan SD dan hanya 1 orang saja yang berpendidikan SLTP. Selain itu, pada awalnya penulis mengelompokkan petani ke dalam 3 kategori yakni petani yang memiliki/mengerjakan sawah sendiri, petani yang menyewa tanah pada orang lain, serta petani yang bekerja pada lahan orang lain/buruh tani. Akan tetapi setelah terjun ke lapangan ternyata kriteria ketiga yakni buruh tani tidak termasuk sebagai yang melakukan usaha dalam pertanian, melainkan hanya buruh saja, persis seperti buruh-buruh di bidang lainnya, buruh bangunan misalnya. Demikian sehingga, penulis hanya dapat mewawancarai 2 kategori yang pertama, yaitu petani yang mempunyai lahan dan petani yang menyewa lahan, dalam berbagai bentuk variasi kerjanya.

Sementara itu, di Ciwidey, Kabupaten Bandung, penulis mendapati kompleksitas produktivitas, distribusi, dan pemasaran di bidang agribisnis. Bahkan di sini petani itu dapat berperan sebagai penanam, pengolah, sekaligus pemasar produk; dalam bidang penanaman strawberry, contohnya. Oleh karenanya, pencarian data menjadi semakin kompleks di wilayah agropolitan ini.

## **1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**

### **a. Kawasan Agropolitan Ciwidey**

Posisi geografis Wilayah Pengembangan Kawasan Agropolitan Ciwidey menurut Peta Rupa Bumi Bakorsurtanal adalah antara 107031'30" BB – 107031'30"BT dan 702'15" LU – 7018'00"LS. Adapun batas-batas wilayah Kawasan Agropolitan Ciwidey adalah:

Sebelah Utara	: Kabupaten Bandung Barat
Sebelah Timur	: Kabupaten Bandung
Sebelah Selatan	: Kabupaten Cianjur
Sebelah Barat	: Kabupaten Cianjur

Wilayah Pengembangan Agropolitan Ciwidey mempunyai luas wilayah yaitu 40.674,67 Ha., yang terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali, dan Kecamatan Pasirjambu, dimana terbagi dalam 22 desa. Untuk lebih rinci nama-nama desa tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a) Kecamatan Ciwidey terdiri atas:**

- 1) Desa Panundaan
- 2) Desa Ciwidey
- 3) Desa Panyocokan
- 4) Desa Lebakmuncang
- 5) Desa Rawabogo
- 6) Desa Nengkelan
- 7) Desa Sukawening

#### **b) Kecamatan Rancabali terdiri atas:**

- 1) Desa Cipelah
- 2) Desa Sukaesmi
- 3) Desa Indragiri
- 4) Desa Patengan
- 5) Desa Alamendah

#### **c) Kecamatan Pasirjambu terdiri atas:**

- 1) Desa Sugihmukti
- 2) Desa Margamulya

- 3) Desa Tenjolaya
- 4) Desa Cisondari
- 5) Desa Mekarsari
- 6) Desa Cibodas
- 7) Desa Cukanggenteng
- 8) Desa Pasirjambu
- 9) Desa Mekarjambu
- 10) Desa Cikoneng

Jumlah Penduduk pada ketiga kecamatan tersebut pada tahun 2000 sebanyak 162.280 Jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali yaitu 15.441 Jiwa, sedangkan untuk daerah yang jarang penduduknya terdapat di Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey yaitu 4.238 Jiwa. Sampai pada tahun 2006 jumlah penduduk Kawasan Agropolitan Ciwidey terus bertambah menjadi 184.145 Jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi masih berada di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali mencapai 17.353 Jiwa atau sekitar 38,6 % dari total jumlah penduduk Rancabali, sedangkan yang terkecil jumlah penduduknya berada di Desa Indragiri Kecamatan Rancabali dengan jumlah penduduk mencapai 4.376 jiwa atau sekitar 9,74 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Rancabali.

Kepadatan penduduk Kawasan Agropolitan Ciwidey rata-rata 6 jiwa/ha. Dari Tabel 4.1. terlihat bahwa pada tahun 2006, kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu dengan tingkat kepadatan 78 jiwa/ha., sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasirjambu dengan tingkat kepadatan 1 jiwa/ha. Secara keseluruhan penyebaran penduduk di Kawasan Agropolitan Ciwidey sudah cukup merata, namun bila dilihat berdasarkan rata-rata kepadatan penduduk yang ada, masih terdapat penumpukan penduduk pada sentral dari Kawasan Agropolitan Ciwidey, yaitu di Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu dan Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kepadatan Penduduk Kawasan Agropolitan

Kecamatan	Desa	Luas (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rata-rata Kepadatan (jiwa/ha)
Ciwidey	1. Panundaan	321,3	10863	34
	2. Ciwidey	218,3	13727	63
	3. Panyocokan	389,2	9802	25
	4. Lebakmuncang	800,0	10459	13
	5. Rawabogo	759,8	6650	9
	6. Nengkelan	346,2	4969	14
Rancabali	7. Sukawening	700,2	9123	13
	8. Cipelah	606,7	8987	15
	9. Sukaesmi	113,9	8829	78
	10. Indragiri	191,0	4376	23
	11. Patengan	2538,3	5385	2
Pasirjambu	12. Alamendah	226,5	17353	77
	13. Sugihmukti	9985,0	11910	1
	14. Margamulya	386,1	6932	18
	15. Tenjolaya	3661,3	11190	3
	16. Cisondari	2024,0	8648	4
	17. Mekarsari	1196,0	4938	4
	18. Cibodas	1926,0	7089	4
	19. Cukanggenteng	463,0	5488	12
	20. Pasirjambu	145,1	6768	47
	21. Mekarmaju	140,0	5696	41
	22. Cikoneng	472,1	4963	11
	<b>Jumlah</b>		<b>27.610</b>	<b>184.145</b>

Sumber: Potensi Desa Jawa Barat Tahun 2006

Penduduk merupakan salah satu indikator perkembangan dan pembangunan wilayah sehingga laju pertumbuhan penduduk perlu diperhatikan dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu Wilayah adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang handal di wilayah tersebut. Dalam pembangunan ekonomi, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Kelompok penduduk dapat dilihat dari

penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari kerja. Lapangan usaha yang terdapat di wilayah Ciwidey terdiri dari pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Sebagian besar penduduk di ketiga kecamatan bekerja pada lapangan usaha pertanian seperti yang ditunjukkan Tabel 4.2. dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk per Lapangan Usaha

No.	Kecamatan	Lapangan Usaha (orang)					Jumlah (orang)
		Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
1.	Ciwidey	16665	2811	4588	2106	5503	31679
2.	Rancabali	17262	822	1086	1588	1096	21854
3.	Pasirjambu	23875	3525	4229	1733	2517	35879

Sumber : Data Sosial Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung 2006

Tabel 4.3. Persentase Penduduk per Lapangan Usaha

No.	Kecamatan	Lapangan Usaha (%)					Jumlah (%)
		Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
1.	Ciwidey	52.62	8.88	14.49	6.65	17.37	100
2.	Rancabali	78.89	3.76	4.97	7.27	5.02	100
3.	Pasirjambu	66.54	9.82	11.79	4.83	7.02	100

Sumber : Data Sosial Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung 2006

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mencerminkan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula. Mata pencaharian penduduk di Kawasan Agropolitan Ciwidey sebagian besar adalah sebagai petani (buruh tani). Faktor ini disebabkan dengan keadaan alam di Kawasan Agropolitan Ciwidey yang subur sehingga cocok untuk lahan pertanian. Sehingga masyarakat Kawasan Agropolitan Ciwidey lebih memilih sebagai petani sebagai mata pencaharian. Selain sebagai buruh tani sebagian penduduk Kawasan Agropolitan Ciwidey ada yang berprofesi sebagai TKI.

## **b. Kecamatan Sumedang Selatan**

Kecamatan Sumedang Selatan mempunyai Luas Wilayah 11.737 Ha., dengan ketinggian  $\leq 501-1000$  mdpl. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim Kecamatan Sumedang Selatan termasuk tipe B, dengan curah hujan 3,518 mm per tahun. Topografi Kecamatan Sumedang Selatan, yang bertemperatur rata-rata 29 C ini, adalah perbukitan, pegunungan, tanah darat, pesawahan dan kolam, dimana unsur tanahnya didominasi oleh tanah liat, pasir dan batuan vulkanik.

Secara administratif eksternal, batas-batas wilayah kecamatan Sumedang Selatan, adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kecamatan Sumedang Utara
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Pamulihan
Sebelah Barat	:	Kecamatan Rancakalong
Sebelah Timur	:	Kecamatan Cibugel

Sebagian wilayah Kecamatan ini berada di perkotaan, sedangkan sisanya berada di perdesaan, dengan demikian unit-unit wilayahnya ada yang disebut desa dan ada pula yang disebut dengan kelurahan.

Sementara secara administratif internal, Kecamatan Sumedang Selatan disangga oleh 14 Desa/Kelurahan, 57 Dusun, 129 RW, dan 506 RT (Rukun Tetangga). Camat Sumedang Selatan saat ini bernama Wawan Kuswandi, S.Sos., dibantu oleh Sekretaris Camat bernama Drs. Timbul Kusdijantono, MM., dan 5 orang kepala seksi dan 3 kepala sub bagian.

Jumlah penduduk kecamatan Sumedang Selatan itu sendiri sampai dengan bulan Desember 2013, mencapai 73.944 Orang, dengan klasifikasi Gender: 37.558 Laki-laki dan 36.386 Perempuan.

Hampir semua warga Kecamatan Sumedang Selatan adalah Warga Negara Indonesia (WNI), kecuali 1 jiwa WNA. Data monografi yang diperoleh dari hasil penelitian, jumlah penduduk Kecamatan Sumedang Selatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Kecamatan Sumedang Selatan

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	

1.	Pasanggrahan Baru	5.469	5.353	10.822	3.240
2.	Regol Wetan	4.135	4.962	9.097	3.449
3.	Kota Kulon	5.501	4.151	9.652	3.481
4.	Cipameungpeuk	2.871	2.865	5.736	1.792
5.	Sukagalih	1.466	1.395	2.861	823
6.	Baginda	2.265	2.217	4.482	2.215
7.	Cipancar	1.470	1.470	2.940	885
8.	Citengah	721	736	1.457	354
9.	Gunasari	2.740	2.566	5.306	1.699
10.	Sukajaya	2.930	2.940	5.870	1.683
11.	Margamekar	1.957	1.820	3.777	1.168
12.	Ciherang	2.934	2.861	5.795	1.267
13.	Margalaksana	1.329	1.363	2.692	815
14.	Mekar Rahayu	1.770	1.687	3.472	987
<b>Total</b>		<b>37.558</b>	<b>36.386</b>	<b>73.944</b>	<b>23.858</b>

Sumber: Tim Kecamatan Sumedang Selatan, 2014.

Karena letaknya yang ada di perkotaan dan pinggiran kota, dipenuhi oleh warga asli dan pendatang dari berbagai daerah, terutama di Jawa Barat, pendidikan masyarakat di Kecamatan Sumedang Selatan cukup plural, dari yang menamatkan pendidikan sampai Sekolah Dasar (SD) sampai pada sarjana, bahkan pasca-sarjana. Secara spesifik data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Sumedang Selatan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	6.663
2	Tidak Tamat SD	1.333
3	Tidak Tamat SLTP	589
4	Tidak Tamat SLTA	509
5	Tidak Tamat PT	137
6	Tamat SD	17.808
7	Tamat SLTP	11.214
8	Tamat SLTA	13.571
9	Tamat PT	2.818
Total		54.642

Sumber: Tim Kecamatan Sumedang Selatan, 2014.

Lembaga pendidikan yang terdapat di Kecamatan Sumedang Selatan cukup banyak, yaitu 82 sekolah, terdiri dari tingkat TK (21 sekolah), SD (38 sekolah), SMP (8 sekolah), SMA (4 sekolah), MI (3 sekolah), MTs (3 sekolah), MA (3 sekolah), dan SLB (2 sekolah). Secara spesifik, kondisi ini dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Jumlah Sekolah di Sumedang Selatan

No.	Tingkat Pendidikan	Banyak Lembaga
1	TK	21
2	SD	38
3	SMP	8
4	SMA	4
5	MI	3
6	MTs	3
7	MA	3
8	SLB	2
Total		82

Sumber: Tim Kecamatan dan KUA Sumedang Selatan, 2014.

Seperti halnya latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat Sumedang Selatan pun berbeda-beda. Menurut data yang diperoleh, jenis mata pencaharian masyarakat Kecamatan Sumedang Selatan dapat diklasifikasikan sesuai tabel berikut.

Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS, TNI/POLRI	4.395
2	Petani	5.189
3	Buruh tani	6.196
4	Pegawai Swasta	6.000
5	Dagang	1.870
6	Wiraswasta	5.212
7	Pensiunan/Lain-lain	4.877
Total		33.739

Sumber: Tim Kecamatan Sumedang Selatan, 2014.

Berdasarkan data di atas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Sumedang Selatan sangat beragam. Namun sebagian besar dari warga Kecamatan Sumedang Selatan memilih untuk menjadi buruh tani, yang dalam tabel di atas termasuk dalam kategori lain-lain (sebanyak 6.196 orang). Selain itu, pegawai swasta juga masuk kategori yang banyak (6.000 orang). Lainnya yang terbanyak adalah wiraswasta (5.212 orang) dan petani (5.189 orang).

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Sumedang Selatan, masyarakat Kecamatan Sumedang Selatan mempunyai potensi-potensi ekonomi yang dapat digambarkan sesuai tabel berikut.

Tabel 4.8. Potensi Ekonomi Masyarakat Sumedang Selatan

No.	Uraian	Jumlah
1	Koperasi	28
2	Usaha Kecil dan Menengah	68
3	Toko/swalayan	207
4	Warung/kios	907
5	Bank	8
6	Industri makanan	55

Sumber: Tim Kecamatan Sumedang Selatan, 2014.

Untuk wilayah perdesaan, pola pertanian tradisional masih mewarnai Kecamatan Sumedang Selatan. Di sini kita dapat melihat secara langsung proses penanaman sayur, palawija, pemupukan organik dan panen, serta menikmati hasil panen bersama petani setempat.

Sumedang Selatan mengedepankan budaya lokal, saung-saung bambu tradisional, makanan tradisional Sumedang, disini diperlihatkan proses pembuatan secara tradisional.

Di Sumedang Selatan kita dapat melihat secara langsung proses penanaman sayur, palawija, pemupukan dan panen, serta menikmati hasil panen bersama petani setempat.

Sumedang Selatan yang mengedepankan budaya dan tata cara tradisional daerah Sumedang khususnya budaya seni masyarakat agraris, Sumedang Selatan dalam beberapa kesempatan menyelenggarakan even pentas budaya seni tradisional.

## 2. Kondisi Pertanian

### a. Kawasan Agropolitan Ciwidey

Pengembangan kawasan agropolitan tentunya perlu mengetahui gambaran umum kondisi pertaniannya khususnya menyangkut komoditas-komoditas pertanian. Ada 16 ragam rata-rata produksi komoditas pertanian (diluar buah-buahan) yang ada di Kawasan Agropolitan Ciwidey di tahun 2004 dan 2005. Secara lebih jelas, gambaran rata-rata produksi per komoditas pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Rata-Rata Produksi di Kawasan Agropolitan Ciwidey

No	Komoditas	Ciwidey		Rancabali		Pasirjambu	
		2004	2005	2004	2005	2004	2005
1	Padi Sawah	53.17	52.97	52.14	53.52	53.82	53.84
2	Padi Ladang	30.00	32.47	27.20	35.26	31.98	39.92
3	Ubi Kayu	138.02	155.78	132.31	148.4 2	132.82	159.66
4	Ubi Jalar	98.32	101.86	95.69	99.12	98.71	103.65
5	Jagung	45.47	45.36	42.42	43.23	42.10	45.23
6	Kacang Tanah			13.93	13.86	14.21	14.21
7	Kacang Merah	99.25		97.54	74.73	100.59	87.28
8	Bawang Daun	121.37	132.01	156.86	160.8 6	122.88	140.10
9	Bawang Merah	105.20		187.94	178.0 8	103.78	88.11
10	Bawang Putih	102.33		173.29	195.3 3	102.60	103.57

11	Kubis	273.78	373.80	297.86	373.15	272.57	366.06
12	Tomat	238.83	235.56	240.42	211.05	241.09	224.63
13	Cabe Besar	64.33	103.67	71.73	75.86	78.87	80.18
14	Kentang	194.28	194.94	226.99	218.96	190.60	188.12
15	Petsai/Sawi	231.71	232.16	209.29	224.30	198.96	185.40
16	Wortel			239.62	228.71		

*Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka, 2004-2006*

### **1. Komoditas Hortikultura**

Komoditas hortikultura yang ada di wilayah agropolitan Ciwidey meliputi tomat, buncis, bawang daun, dan seledri. Adapun rantai tataniaga yang terjadi pada komoditas sayur-sayuran 100 % ditampung oleh bandar atau tengkulak dari petani. Setelah itu bandar membawa barang langsung ke Pasar Ciwidey kemudian ke Soreang. Namun aliran barang juga terjadi dari bandar langsung ke pasar-pasar di Bandung.

### **2. Komoditas Strawberry**

Untuk komoditas strawberry memiliki rantai tata niaga yang berbeda dengan komoditas hortikultura lainnya karena ada beberapa tipe pola pemasaran yang terjadi untuk komoditas ini. Pertama, untuk komoditas strawberry “petik sendiri”, aliran barang langsung terjadi dari petani ke konsumen atau pembeli. Para wisatawan yang ingin membeli strawberry bisa langsung mendatangi kebun-kebun strawberry yang biasanya terletak di pinggir jalan. Untuk pola pemasaran seperti ini memiliki nilai tambah yang tinggi, namun dalam pemeliharannya juga membutuhkan biaya yang tinggi. Kedua, pola pemasaran langsung dari petani ke penjual strawberry. Pola pemasaran seperti ini biasanya terjadi di dekat kawasan-kawasan wisata, karena biasanya para penjual strawberry menjajakan strawberry segar kepada para wisatawan. Untuk mencapai tempat wisata, strawberry harus

dalam keadaan baik dan segar, oleh karena itu perkebunan strawberry setempat menjadi referensi utama dalam pemasok strawberry untuk diujakan di kawasan wisata. Terakhir, pola pemasaran dari petani ke industri rumah tangga olahan strawberry. Pola pemasaran seperti ini biasanya untuk meningkatkan nilai tambah produk strawberry yang memiliki kualitas kurang baik. Adanya pola pemasaran seperti ini dapat menyelamatkan produk-produk yang tidak terpakai untuk dijual secara langsung dan dapat meningkatkan nilai jual dari produk strawberry tersebut.

### **3. Komoditas Padi Sawah**

Rantai tata niaga yang berlangsung untuk komoditas padi sawah terbagi menjadi dua, yakni dari petani langsung menjual ke tengkulak/pengumpul dengan persentasi 40% dan dikonsumsi sendiri oleh keluarga sebesar 60%. Dari tengkulak/pengumpul biasanya barang dialirkan ke pasar-pasar terdekat mulai dari Ciwidey, Soreang sampai Bandung.

### **4. Komoditas Teh Rakyat**

Rantai tata niaga untuk komoditas teh rakyat berlangsung dari petani hingga pabrik-pabrik besar untuk pemasaran. Para petani membawa hasil produk mereka ke pengumpul-pengumpul lokal, kemudian para pengumpul membawa hasil pertanian tersebut ke pabrik pengolahan teh. Di pabrik pengolahan dilakukan proses pengolahan tahap awal seperti shortasi (sortir) atau pemilihan dan pemisahan daun-daun teh, pengeringan daun-daun teh, kemudian penggilingan teh. Selanjutnya hasil pengolahan daun teh dibawa ke pabrik-pabrik besar untuk pengemasan, labelisasi, dan kemudian dipasarkan.

### **5. Komoditas Susu Sapi Perah**

Untuk komoditas sapi perah, hampir semua hasil produksi susu sapi petani dikumpulkan oleh KUD (Koperasi Unit Desa). Para petani mau tidak mau harus mengumpulkan hasil produksi mereka ke KUD karena tidak adanya pasar yang dapat menampung hasil produksi mereka. Dari KUD susu langsung dikirim ke

pabrik-pabrik besar yang umumnya berada di Bandung untuk dijadikan bahan baku dari produk mereka, seperti susu kaleng, permen, keju, dan lain-lain. Namun ada juga sebagian kecil dari produksi susu yang dikonsumsi sendiri maupun dibeli langsung oleh wisatawan.

## **6. Komoditas *Home Industry***

Industri Rumah Tangga ada tiga, yakni bilik bambu, olahan strawberry dan kaluah jeruk. Untuk industri bilik bambu, rantai tata niaga terjadi dari pengrajin langsung ke *consumer* atau pembeli yang pada umumnya berasal dari kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Bogor, hingga Surabaya. Kebanyakan para peminat bilik bambu ini sengaja datang langsung ke Ciwidey atau karena tidak sengaja saat berwisata ke daerah tersebut.

Untuk industri olahan strawberry, 50% produknya dijual ke kios-kios penjaja oleh-oleh yang kemudian dibeli oleh para wisatawan dan 50% rantai tata niaga lainnya berlangsung dari pengrajin langsung ke konsumen/wisatawan. Biasanya pola pemasaran yang kedua ini berlangsung jika para wisatawan tahu dan langsung datang ke lokasi industri tersebut.

Terakhir, industri rumah tangga kaluah jeruk. Rantai tata niaga yang berlangsung pada industri ini langsung dari pengrajin ke konsumen yang dijajakan di kios-kios yang umumnya milik mereka sendiri. Pada umumnya konsumen yang membeli produk kaluah jeruk ini adalah para turis atau wisatawan yang sedang bertamasya di kawasan Ciwidey.

### **b. Kecamatan Sumedang Selatan**

Produksi padi di Kabupaten Sumedang dalam setahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 produksi padi sebesar 447.546 ton dan tahun 2013 menghasilkan 503.912 ton atau meningkat sebesar 12,59 persen. Peningkatan produksi padi tersebut sejalan dengan meningkatnya luas panen dari 76.871 hektar menjadi 80.793 hektar atau naik sebesar 5,1 persen. Kondisi musim hujan yang cukup lama menyebabkan petani mengoptimalkan menanam padi dibanding menanam palawija. Peningkatan produksi padi berbanding terbalik dengan

produksi palawija. Hampir semua tanaman palawija mengalami penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada produksi tanaman jagung, kedelai dan kacang hijau dan ubi jalar. Penurunan jagung sebesar 16,80 persen, kedelai sebesar 44,79 persen, kacang hijau sebesar 44,34 persen dan ubi jalar sebesar 27,92 persen.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, Sumedang menempati urutan ke 14 dalam andilnya terhadap produksi padi Jawa Barat yaitu memberikan kontribusi sebesar 4,17 persen. Kabupaten/Kota yang menempati urutan 3 besar penyumbang produksi padi di Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu, Karawang dan Subang yaitu masing masing memberi kontribusi sebesar 11,88 persen (1.435.938 ton), 9,49 persen ( 1.147.212 ton) dan 8,46 persen (1.022.571 ton). Sedangkan kontributor terkecil adalah Kota Depok yaitu 0,016 persen dengan produksi sebesar 1.880 ton.

Produktivitas tanaman padi di Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yaitu dari 57,61 kw/ha tahun 2011, kemudian mencapai 58,22 kw/ha tahun 2012 dan tahun 2013 mencapai 62,37 kw/. Produktivitas tanaman palawija yang mengalami peningkatan hanya kacang tanah dan ubi kayu sementara untuk tanaman palawija lainnya mengalami penurunan.

Khusus untuk Kecamatan Sumedang Selatan, pengembangan pertanian tentunya perlu mengetahui gambaran umum kondisi pertaniannya khususnya menyangkut komoditas-komoditas pertanian. Ada 15 ragam rata-rata produksi komoditas pertanian (diluar buah-buahan) yang ada di Sumedang Selatan di tahun 2013. Secara lebih jelas, gambaran rata-rata produksi per komoditas pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Rata-Rata Produksi di Sumedang Selatan

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Padi Sawah	4.144	3.623	24.791	68.43
2	Padi Ladang	88	80	214	216
3	Ubi Kayu	549	390	5.287	1.616
4	Jagung	319	353	1.308	443
5	Kacang Tanah	139	139	182.07	126

6	Kacang Gondola	15	15	19	25
7	Bawang Daun	10	6	-	5.160
8	Buncis	5	4	-	2.090
9	Ketimun	14	6	-	6.290
10	Terung	5	4	-	2.510
11	Tomat	8	4	-	5.840
12	Cabe Rawit	7	5	-	3.330
13	Cabe Besar	6	3	-	2.110
14	Labu Siam	2	2	-	10
15	Kangkung	1	1	-	8

Sumber: Tim Kecamatan Sumedang Selatan, 2014.

### **1. Komoditas Hortikultura**

Komoditas hortikultura meliputi tomat, buncis, bawang daun, dan seledri. Adapun rantai tataniaga yang terjadi pada komoditas sayur-sayuran 100 % ditampung oleh bandar atau tengkulak dari petani. Setelah itu bandar membawa barang langsung ke Pasar Taman Endog, di daerah kota Sumedang dan Pasar Tanjungsari. Namun aliran barang juga terjadi dari bandar langsung ke pasar-pasar di Bandung.

### **2. Komoditas Padi Sawah**

Rantai tata niaga yang berlangsung untuk komoditas padi sawah terbagi menjadi dua, yakni dari petani langsung menjual ke tengkulak/pengumpul dengan persentasi 40% dan dikonsumsi sendiri oleh keluarga sebesar 60%. Dari tengkulak/pengumpul biasanya barang dialirkan ke pasar-pasar yang cukup jauh, yaitu ke Jakarta.

### **3. Komoditas Home Industry**

Industri Rumah Tangga merupakan pekerjaan sambilan kaum petani Sumedang, yakni dengan membuat makanan kemasan seperti sale pisang. Adapun yang paling utama dalam hal industri rumah tangga ini adalah tahu, yang sudah terkenal sebagai “tahu sumedang”. Untuk industri sale pisang, rantai tata niaga terjadi dari pengrajin langsung ke konsumen atau pembeli yang pada umumnya berasal dari kota-kota besar seperti Bandung dan Cirebon. Kebanyakan para

peminat sale pisang ini karena tidak sengaja saat melewati atau berwisata ke daerah Sumedang.

Untuk industri olahan tahu, 50% produknya dijual ke kios-kios penjaja oleh-oleh yang kemudian dibeli oleh para wisatawan dan 50% rantai tata niaga lainnya berlangsung dari pengrajin langsung ke konsumen/wisatawan. Biasanya pola pemasaran yang kedua ini berlangsung jika para wisatawan tahu dan langsung datang ke lokasi industri tersebut. Yang terkenal pada saat ini adalah kedai tahu “Palasari,” dekat pasar swalayan “Griya.” Di tempat itulah kebanyakan para pengunjung kota Sumedang berhenti beristirahat, makan, dan membawa tahu untuk oleh-oleh dibawa pulang. Adapun untuk mobil-mobil angkutan umum, sudah ada para penjaja yang menjajakan tahu di dalam kendaraan umum yang kebanyakannya dipasok oleh kios-kios tahu pinggir jalan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Masalah Ketahanan Pangan Petani**

Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Kecamatan Sumedang Selatan juga sedang giat melaksanakan program-program pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik yang dilaksanakan adalah pembangunan gedung SD, polindes, pengaspalan jalan, jembatan, dan masjid. Karena penelitian ini tidak memberikan batasan waktu mengenai kapan pembangunan tersebut dilaksanakan, namun berdasarkan data yang peneliti peroleh dari para informan diketahui bahwa pembangunan fisik kebanyakan dilaksanakan bukan oleh tingkatan Kecamatan, tetapi lebih oleh tingkatan Kabupaten. Sementara untuk pembangunan non-fisik berupa pembentukan media bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi mengenai kesehatan, pendidikan, pertanian, rohani berlangsung melalui program-program penyuluhan dan pengajian.

Untuk menambah pengetahuan masyarakat dan mensosialisasikan program-program atau kebijakan-kebijakan baru, diadakanlah penyuluhan (di tingkat RW dengan pembicara dari Kecamatan) meskipun frekuensi pertemuannya sangat sedikit. Penyuluhan merupakan bentuk pendidikan informal

untuk mendidik masyarakat agar menjadi tahu dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Penyuluhan adalah suatu sistem pendidikan dengan percontohan. Tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani dengan program modernisasi pertanian sehingga tercipta perubahan sikap mental dan cara bekerja melalui kombinasi belajar sambil berbuat (*learning by doing*) sehingga masyarakat terangsang untuk meniru dan peningkatan keterampilan dapat terbina karena disertai contoh-contoh nyata (Assegaff, 1987).

Ketika berbicara mengenai program pembangunan, maka yang perlu dibahas tidak hanya program apa yang telah dan akan dilaksanakan sebagai manifestasi dari program pembangunan tersebut, akan tetapi harus ditilik lebih jauh mengenai asal ide pembangunan, identifikasi masalah, perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, serta sumber dananya.

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa peran serta warga dalam proses pembangunan perdesaan di Kecamatan Sumedang Selatan berupa pemunculan ide-ide pembangunan yang perlu dilaksanakan di desa-desa tersebut. Hal itu menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kepekaan dari masyarakat mengenai lingkungannya. Partisipasi mempunyai prinsip utama kerjasama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation and personal growth*). Sehingga partisipasi berfokus lebih pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang sederajat dalam proses berbagi pengetahuan atau kemampuan (Nasution, 1988).

Kleijans (dalam Nasution, 2002) berpendapat bahwa pembangunan itu pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP (*Gross National Product*), tetapi peningkatan pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri.

Selain penggalian ide-ide, pelaksanaan suatu program pembangunan memerlukan tahapan lain yang tidak kalah pentingnya seperti yang termuat dalam desain instruksional sebagai salah satu desain dalam strategi komunikasi pembangunan. Desain ini memfokuskan pada pembelajaran individu-individu

yang dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental. Tahapan-tahapan yang tercakup dalam desain ini adalah perencanaan, implementasi, evaluasi (Nasution, 1988).

Selain pemunculan ide, identifikasi masalah, pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut harus pula datang dari masyarakat. Hal itu membuat warga semata-mata bukan hanya menjadi obyek pembangunan, tetapi juga subyek pembangunan. Partisipasi warga tersebut bahkan juga sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasinya.

Saat ini, masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat mulai merasakan akibat pemanasan global berupa anomali iklim yang menyebabkan kekeringan, kegagalan panen dan melonjaknya harga beras. Kita telah banyak mendapat peringatan akan bahaya pemanasan global terhadap produk pertanian. Maka kejadian kekeringan sekarang merupakan '*entry point*' bagi pemerintah untuk segera meninjau paradigma pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Selama ini pemerintah menekankan ketahanan pangan dan 'mengabaikan' kedaulatan pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan lebih menekankan pada aspek ketahanan pangan bukan pada kedaulatan pangan. Dan, beras menjadi andalan utama dalam kebijakan ketahanan pangan sehingga mengabaikan kekuatan lokal yaitu non beras.

Hal ini menyebabkan konsentrasi kebijakan pangan hanya berfokus pada beras padahal potensi pangan non beras sangat besar. Contoh kasus ancaman rawan pangan yang terjadi saat ini adalah rawan pangan dalam pengertian keterbatasan persediaan beras bukan pangan umumnya. Jika pangan tidak diartikan hanya beras maka kerawanan ini masih mudah diatasi karena masyarakat umumnya masih memiliki cadangan makanan seperti ubi, jagung, pisang, ikan, daging, telur dan lain-lain.

Aturan di atas mengandung kelemahan sebab tidak secara seimbang upaya menumbuhkan sistem kedaulatan pangan beras dan non beras yang berbasis kekuatan lokal. Karena mengabaikan hal tersebut maka pembangunan pertanian selama ini cenderung melemahkan kemampuan

masyarakat lokal dalam melestarikan keunggulan-keunggulan lokal. Contoh, pemerintah selalu memberikan bantuan benih padi atau jagung dengan varieties berubah-ubah setiap tahun. Hal ini menyulitkan petani dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan tersebut. Sehingga ada kesan pembangunan pertanian telah dijadikan lahan proyek bagi kalangan tertentu karena mengabaikan kemampuan dan keadaan masyarakat paling bawah (petani).

Akibatnya, konsentrasi pemerintah dalam mengatasi serta mengantisipasi kerawanan pangan masyarakat hanya bersifat sementara karena mengutamakan bantuan sosial atau tanggap darurat atau operasi pasar. Untuk jangka pendek, hal tersebut dapat diterima tetapi untuk jangka menengah dan panjang, semua bantuan tersebut telah memasung kreativitas masyarakat untuk berproduksi.

Kedaulatan pangan artinya masyarakat dengan daya upaya sendiri mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menanam berbagai tanaman sesuai kondisi lokal. Kemampuan tersebut dapat terwujud karena mereka memiliki kearifan lokal yaitu kemampuan membudidayakan tanaman lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka setiap hari secara turun temurun.

Berbagai jenis tanaman lokal tersebut selain dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap hari tetapi juga mampu melestarikan nilai dan pandangan hidup petani terhadap tanaman lokal. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di perdesaan Sumedang memiliki banyak kepercayaan terhadap manfaat padi lokal. Yakni, untuk pengobatan dan kecantikan tradisional, adat dan budaya. Padi lokal telah menjadi inti dari sistem pertanian, sebab biasanya petani selain menanam padi petani juga menanam jagung, sorgum, jewawut, ketimun, labu, lombok, serta beberapa jenis ubi dalam sistem tumpang sari. Itulah yang terjadi pada produksi pertanian.

Sementara itu, dari segi distribusi, pemberdayaan dalam sistem distribusi pangan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian, pemberdayaan dalam distribusi pangan juga dapat meningkatkan efisiensi rantai distribusi hasil pertanian dan pada gilirannya akan menjadikan harga produk pertanian akan lebih bersaing. Dengan demikian maka ketahanan pangan akan meningkat.

Meningkatnya ketahanan pangan dapat diartikan sebagai meningkatnya lima unsur yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang meliputi:

- 1) Berorientasi pada rumah tangga dan individu;
- 2) Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses;
- 3) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial;
- 4) Berorientasi pada pemenuhan gizi; dan
- 5) Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan terdiri atas sub-sistem utama yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Sub-sistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan, serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Sub-sistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka, agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk. Sedangkan sub-sistem konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.

Bila ketahanan pangan ini dapat dicapai maka manfaatnya tentu akan dirasakan seluruh rakyat serta menumbuhkan rasa nasionalisme karena kemampuan bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangan sampai ke tingkat ke rumah tangga, tanpa harus tergantung dengan produk impor dari negara lain.

Dengan meningkatnya ketahanan pangan akan memberikan kontribusi pada kemandirian bangsa di bidang pangan. Kemandirian bangsa di bidang pangan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dalam mengelola kebutuhan pangan nasional baik dalam bidang produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## **2. Lembaga Sosial Perdesaan**

Ketika dalam suatu komunitas tidak ditemukan media massa, maka disitulah hadir media sosial yakni media yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Siregar, 1990). Keberadaan media sosial tersebut berfungsi sebagai saluran-saluran yang dapat digunakan sebagai penyebarluasan informasi dan mengekspresikan diri. Meski pernyataan ketidakberadaan media massa dalam suatu komunitas sebagai penyebab kehadiran/kemunculan media sosial itu tidak dapat sepenuhnya dikatakan benar mengingat untuk kondisi sekarang media massa sudah dapat diakses di manapun. Namun yang membedakan media sosial dengan media komunikasi lainnya adalah kemungkinannya untuk tercipta integrasi ketika proses komunikasi sosial berlangsung dalam suatu media yang disebut media sosial tersebut (Susanto, 1985).

Media sosial ini bersifat aspiratif. Media aspiratif di sini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi penduduk atau media ekspresi diri yang berkaitan dalam proses pembangunan di Kecamatan Sumedang Selatan dan Kawasan Agropolitan Ciwidey. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peranan media sosial itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sumedang Selatan dan Kawasan Agropolitan Ciwidey, media sosial yang ada di dua kawasan tersebut adalah pengajian, tahlilan, musyawarah RT, dan rembug desa. Namun untuk tahlilan dan pengajian yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu tersebut murni berupa kegiatan rohani. Jadi dalam kedua kegiatan tadi tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa, sehingga penulis tidak membahas terlalu dalam mengenai kegiatan ini.

Sementara untuk rembug desa tidak dihadiri oleh seluruh warga tapi hanya perwakilan RT dan RW kadangkala juga tergantung pada materi yang dibicarakan dan tidak dilaksanakan secara rutin.

Selain masalah frekuensi penyelenggaraan dan peserta, materi yang dibahas dalam rembug desa dan pertemuan RT juga menjadi salah satu faktor yang penting. Biasanya materi pertemuan berkaitan dengan kebutuhan warga misalnya mengenai keamanan, pajak, pemilu, dan sebagainya sehingga warga merasa membutuhkan akan pertemuan tersebut.

Minat untuk menghadiri suatu kegiatan juga didasari atas adanya harapan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta cara memperoleh harapan itu. Hal itu tersirat dari pendapat Ton Kertopati (1981) seperti di bawah ini: “Adapun pesan yang disampaikan kemungkinan akan diterima komunikan apabila pesan tersebut sesuai dengan kebutuhan pribadinya (*personality needs*).”

Jadi pesan yang dinilai oleh seorang komunikan dirasakan memuaskan atau mencukupi kebutuhan pribadinya ataupun lingkungan sosialnya maka ia akan mempunyai kecenderungan menanggapi pesan tersebut. Salah satu wujud dari tanggapan terhadap pesan yang disampaikan adalah berupa kehadiran/partisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Komunikasi akan berlangsung selama orang mempunyai apa yang disebut *'expectation of reward'* atau adanya harapan akan memperoleh suatu keuntungan dari pelaksanaan komunikasi itu. Keuntungan atau manfaat yang diharapkan merupakan pemenuhan orang dalam bentuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial” (Skinner dalam Susanto, 1977)

Selain adanya harapan untuk memenuhi kebutuhan dan cara memperoleh harapan, minat untuk menghadiri dan berpartisipasi juga didorong oleh adanya tekanan dan harapan masyarakat. Ia tidak disenangi oleh anggota masyarakat yang lain jika kurang rajin, sebaliknya akan mendapat pujian jika besar partisipasinya (Rogers dan Shoemaker, 1986).

Dalam rembug desa dan pertemuan RT yang bersifat tatap muka memungkinkan terjadinya komunikasi 2 arah antara warga dan pengurus RT dan desa.

Komunikasi efektif menurut Schramm harus memperhatikan beberapa hal di bawah ini, yakni:

1. Pesan yang disampaikan harus dapat menarik perhatian khalayak yang dituju.
2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
3. Dapat menumbuhkan kebutuhan pribadi khalayak dan juga harus diberikan cara/upaya memenuhinya.

4. Harus memuat upaya bagaimana dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan harus pula tidak lepas dari lingkungan budaya (Assegaf, 1987).

Kelembagaan yang menaungi dan memfasitasi kepentingan petani dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan pun sangat penting adanya. Koperasi Unit Desa (KUD) yang selama ini menjadi badan usaha milik petani belum dapat dioptimalkan peran dan fungsinya, hal ini diantaranya disebabkan oleh lemahnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah. KUD mengalami kesulitan untuk ekspansi usaha ke sistem distribusi pangan karena keterbatasan kemampuan dan permodalan.

Ada beberapa hal mengenai kondisi sosial pertanian modern, yaitu:

Hilangnya kearifan tradisional dan budaya tanaman lokal. Masyarakat Indonesia umumnya bertani dengan memperhatikan keadaan sosial di sekitarnya. Apabila menggunakan sistem pertanian konvensional, tidak ada lagi kearifan tradisional dan kebanyakan tanaman yang ditanam adalah tanaman yang sedang naik daun atau tanaman yang dibutuhkan sangat banyak dan berdaya jual tinggi. Sehingga tanaman-tanaman lokal tidak dapat bersaing karena sedikit sekali petani yang menanamnya.

Peningkatan kesenjangan sosial dan jumlah petani gurem di perdesaan. Jika di suatu desa digunakan sistem pertanian konvensional dapat terjadi peningkatan kesenjangan sosial di antara para petani. Hal itu disebabkan karena hanya petani yang bermodal besar yang dapat menjalankan sistem ini sedangkan petani dengan modal kecil tidak akan mampu membeli mesin dan bahan tanam seperti petani konvensional. Oleh karena itu pertanian konvensional akan dapat meningkatkan kesenjangan sosial terutama di daerah perdesaan.

Ketergantungan petani pada pemerintah dan perusahaan/industri agrokimia. Karena dibutuhkan modal yang sangat besar, para petani konvensional membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam hal modal dan informasi-informasi terbaru tentang pertanian. Petani juga akan mengalami ketergantungan dengan perusahaan/industri agrokimia, karena kebanyakan mereka menggunakan bahan-bahan kimia.

Rasa kekeluargaan dan kekompakan antar petani berkurang. Pertanian konvensional lebih menggunakan mesin daripada tenaga manusia atau petani. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya rasa kekeluargaan dan kekompakan antar petani. Padahal hal tersebut sangat berbahaya karena petani bisa-bisa bersaing secara tidak sehat.

Pengabaian pengetahuan lokal petani. Pendekatan konvensional dari atas ke bawah pada pengembangan teknologi dalam lembaga penelitian pertanian hanya memberikan sedikit kesempatan pada ilmuwan untuk lebih mengenal kondisi. Situasi ini tidak dibenahi oleh sikap umum dari para penyuluh dan peneliti yang telah mendapatkan ilmu di universitas maupun sekolah, bahwa sistem pendidikan formal merupakan sumber utama inovasi dan bahwa informasi hanya bisa datang dari atas.

Penekanan pada penelitian. Kondisi produksi lembaga penelitian dan tempat percobaan tidak mencerminkan kondisi petani dan tidak mungkin mewakili kondisi pertanian tadah hujan yang sangat beragam. Akibatnya, teknologi yang di uji di tempat, percobaan seringkali tidak bisa diterapkan dengan kondisi petani, sementara kualitas varietas lokal yang baik, yang disesuaikan dengan kondisi lokal, tidak diakui dalam tempat percobaan (Biggs, 1984).

Dalam pertanian tradisional terjadi hubungan yang erat antar sesama dikarenakan dalam proses pertanian tradisional menjunjung tinggi tolong menolong dan gotong royong, apalagi dengan sistem tradisional yang menyebabkan antar petani saling membutuhkan dan membantu untuk menghasilkan produktivitas pertanian yang telah diolah.

### **3. Kearifan Lokal untuk Ketahanan Pangan**

#### **a. Pertanian Tradisional**

Sistem pertanian tradisional adalah sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Sistem pertanian tradisional salah satu contohnya adalah sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah telah tidak sejalan lagi dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat akibat bertambahnya penduduk.

Pertanian tradisional bersifat tak menentu. Keadaan ini bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa manusia seolah-olah hidup di atas tonggak. Pada daerah-daerah yang lahan pertaniannya sempit dan penanaman hanya tergantung pada curah hujan yang tak dapat dipastikan, produk rata-rata akan menjadi sangat rendah, dan dalam keadaan tahun-tahun yang buruk, para petani dan keluarganya akan mengalami bahaya kelaparan yang sangat mencekam. Dalam keadaan yang demikian, kekuatan motivasi utama dalam kehidupan para petani ini barangkali bukanlah meningkatkan penghasilan, tetapi berusaha untuk bisa mempertahankan kehidupan keluarganya.

Pertanian tradisional biasanya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani dan tidak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani, sehingga hasil keuntungan petani dari hasil pertanian tradisional tidak tinggi, bahkan ada yang sama sekali tidak ada dalam hasil produksi pertanian.

Sebenarnya, pertanian tradisional merupakan pertanian yang akrab lingkungan karena tidak memakai pestisida. Akan tetapi produksinya tidak mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Untuk mengimbangi kebutuhan pangan tersebut, perlu diupayakan peningkatan produksi yang kemudian berkembang sistem pertanian konvensional (Pracaya, 2007).

Dalam pertanian tradisional biasanya menggunakan prinsip yang mana pertanian tradisional hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya sekarang, misalnya pada masyarakat bercocok tanam tanaman padi yang mana hasil padi yang telah diproduksi dan diolah menjadi beras kemudian dikonsumsi oleh keluarganya, sehingga terus berjalan kelangsungan hidupnya.

Kemudian ciri dari pertanian tradisional yaitu masih berpaku dan berharap pada alam yang mana ketika masyarakat menanam suatu tanaman dengan pertanian tradisional maka hasilnya akan tergantung pada proses alam.

Sistem pertanian masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan seperti Sumedang Selatan nyaris tak tersentuh oleh teknologi. Cara-cara yang mereka gunakan sebagaimana yang sudah diajarkan secara turun-temurun, tradisional demikian orang menyebutnya. Bagi mereka bertani tidak sekedar menggarap

lahan lalu mengambil hasilnya, tetapi juga menjaga tradisi yang sudah ada seperti; ritual mengawali panen padi, menggunakan hari baik sebelum menggarap, menanam, dan memanen.

Untuk itu peran sesepuh desalah yang lebih paham menentukan hari baik atau waktu yang tepat. Petani tradisional Sumedang Selatan tidak menanam bibit unggul hasil penemuan para ahli. Kebanyakan mereka enggan untuk membeli bibit-bibit yang dijual di pasaran, selain pertimbangan harga juga kekhawatiran terhadap hama yang ditimbulkan, belum lagi pengadaan pestisida dengan merk tertentu yang harus digunakan dan pastinya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh petani. Mereka memilih menanam jenis padi yang biasa ditanam oleh para pendahulunya. Jenis padi yang ditanam disesuaikan dengan perhitungan musim, untuk menjaga ketahanan tanaman padi dari gangguan hama sehingga terhindar dari gagal panen.

Ketika diperbandingkan dengan budaya pertanian di Wilayah Agropolitan Ciwidey, masyarakat Sumedang Selatan merasa bahwa untuk variasi pertanian seperti di Ciwidey tidak bisa dilakukan di Sumedang, mengingat struktur tanah dan airnya yang berbeda. Untuk Sumedang Selatan, air selalu datang mengalir secara terus-terusan dari Situ Cipanteneun, Gajah Depa, dan Cikole. Demikian sehingga, lebih enak ditanami sawah daripada yang lain. Kalau bentuknya kebun, akan susah mengeluarkan air yang terus mengalir tersebut. Oleh karenanya, sawah lebih baik, karena dapat tergenangi air yang mengalir tersebut.

Dalam mengolah sawah petani Sumedang Selatan lebih memilih sapi atau kerbau (ternaknya) sebagai alat membajak sawah. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa traktor, tenaga sapi atau kerbau juga lebih ramah lingkungan, daya bajak tanahnya lebih dalam dan '*ledok*'-nya merata. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida oleh petani tradisional relatif sedikit karena harganya tidak terjangkau, sehingga petani lebih mengandalkan pupuk kandang. Untuk menjamin ketersediaannya petani Sumedang Selatan tertuntut untuk memiliki hewan ternak.

Keberadaan peternakan petani terjadi juga di Wilayah Agropolitan Ciwidey. Namun, ternak di sini tidak untuk dipekerjakan di sawah atau ladang, tetapi diambil kotorannya untuk dijadikan pupuk kandang.

Bagi petani Sumedang Selatan memelihara hewan ternak menjadi suatu keharusan. Tak hanya pupuk yang didapat, tenaga ternak (sapi, kerbau) juga dapat dimanfaatkan. Hewan ternak juga menjadi bentuk simpanan (harta) yang bisa berkembang dan sewaktu-waktu dapat dijual. Ketahanan pangan dan kemandirian petani tradisional sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman nenek moyang, mereka tinggal melanjutkan dan menjaga kelestarian alam. Kearifan lokal petani tradisional bukan berarti menolak teknologi modern, penggunaan alat transportasi dan mesin penggilingan padi menjadi bukti teknologi itu diterima di Sumedang Selatan.

Banyak kalangan yang mengharapkan perubahan pada petani tradisional dengan dalih meningkatkan kualitas hidup. Melalui penyuluhan dengan program terpadu berusaha mentransformasi dari petani tradisional ke arah petani modern. Agar mampu meningkatkan sumber pendapatan dari produksi pertaniannya, petani tidak sekedar bercocok tanam. Hal itu tak jauh dari penggunaan bibit unggul, pemakaian pupuk kimia dan penanggulangan hama dengan pestisida. Dari pengakuan para petani di Sumedang Selatan, memang pihak pemerintah membantu pengadaan bibit, pupuk, dan pestisida dengan cara pembuatan koperasi. Caranya adalah dengan meminjamkan hal-hal yang menjadi bahan pertanian tersebut. Bahkan jika gagal panen (puso) pun, semua yang diambil di koperasi itu tidak harus dibayar. Namun banyak masyarakat petani yang tidak mau mengambil barang dari koperasi, karena kalau dihitung-hitung, ternyata harganya lebih mahal. Sedangkan gagal panen itu sangat jarang terjadi di Sumedang Selatan. Oleh karena itu, para petani lebih memilih pola tradisional.

Pola pertanian tradisional ini cocok dengan pola hidup manusia modern yang sudah berkesadaran akan kesehatan. Dalam kehidupan seperti itu, manusia modern menerapkan pola hidup dengan mengonsumsi produk pertanian organik.

Dewasa ini orang semakin arif dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Hal inilah yang semestinya disampaikan kepada masyarakat petani tradisional yang artinya produk merekalah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat modern. Penyuluhan yang diharapkan bagi petani tradisional adalah pengembangan budidaya pertanian organik yang

diprioritaskan pada tanaman bernilai ekonomis tinggi untuk memenuhi pasar domestik dan ekspor.

Bukan tanpa sebab memang jika nasehat itu terlontar sebab saat ini di era informasi yang serba bebas, petani menjadi lebih memiliki peluang untuk cepat maju ketimbang tengkulak. Sarana komunikasi HP (*hand phone*) sudah cukup untuk membuat petani berani menentukan harga jual produknya. Petani sekarang pun sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa menghitung biaya pengolahan, sehingga ia bisa memaksimalkan harga produknya di hadapan seorang tengkulak. Pada akhirnya, fungsi tengkulak hanyalah mesin distribusi bagi petani dan sapi perahan bagi pedagang besar.

Kelicikan para pemilik usaha besar perdagangan hasil pertanian telah membuat petani enggan berhadapan dengan mereka. Iming-iming harga hanya kamufase, yang terjadi adalah "penyunatan" dari setiap porsi kualitas yang ditawarkan petani. Kalau sekarang petani lebih memilih penjualan hasilnya di lahan, itu karena mereka tahu, bahwa biaya untuk pengolahan pasca panen sangat mahal, mulai biaya petik, kuli angkut, transportasi sampai dengan proses setengah jadinya, apalagi jika terjadi pada saat panen raya. Biaya-biaya tu akhirnya di tanggung oleh tengkulak.

Tengkulak biasanya memiliki sarana pengolahan pasca panen tersebut, permodalan mereka kebanyakan didukung oleh para *trading company* atau pedagang besar dengan menjaminkan asset miliknya. Dengan segala kelicikannya para pedagang besar menciptakan tekanan harga pada para tengkulak, sehingga sulit bagi para tengkulak untuk mendapatkan laba maksimal. Kejadian inilah mungkin yang dialami pula oleh koperasi-koperasi unit desa selama ini, hingga menyebabkan bangkrutnya hampir semua KUD.

Pola distribusi seperti ini sudah berlangsung sangat lama, hanya berbeda istilah saja di setiap eranya. Perubahan yang menggembirakan hanyalah mmeningkatnya posisi tawar petani, berita buruknya adalah semakin berkembangnya faham kapitalis di masyarakat. Jika pemerintah ingin serius meningkatkan produktivitas dunia pertanian, maka sebaiknya pemerintah total menjadi "pedagang besar" hasil pertanian, seperti Bulog tapi bukan Bulog

sekarang, karena Bulog sekarang lebih senang membeli dari pedagang besar (kontraktor) daripada membeli langsung dari petani, mungkin karena bisa dengan mudah memenuhi target dari penguasa.

Bisa dibayangkan, jika satu jalur distribusi bisa diputus, dengan asumsi tingkat efisiensi harga yang diperoleh Rp. 100,- (kita ambil contoh beras), untuk satu juta ton akan dihemat anggaran untuk bulog sebesar Rp. 100.000.000.000,-.

### **b. Penghasilan Tambahan Petani**

Tanpa penghasilan tambahan, petani nampaknya cukup kerepotan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Walaupun memang masih ada yang tidak bisa lagi bekerja selain menjadi petani. Menurut petani kentang di Ciwidey, kegiatan yang ia lakukan semasa tidak bertani, misalnya kemarau panjang, adalah hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi musim penghujan.

Namun begitu, banyak juga petani yang mempunyai pekerjaan sampingan. Seorang janda di Sumedang Selatan mempunyai warung dekat sekolahan. Dari situlah ia mendapatkan penghasilan tambahan. Untuk aktivitas pertanian, ia hanya bisa mengatur dan mengontrol, dibantu anaknya yang sudah menikah yang membantu pertanian dan warungnya.

Kebanyakan petani di Sumedang Selatan mengisi waktu mereka di sela-sela kegiatan pertanian adalah dengan menjadi buruh bangunan. Ada pula yang menjadi kuli pembuatan sumur, dan pekerjaan-pekerjaan fisik lainnya.

Namun yang menjadi pekerjaan sambil menyenangkan seperti halnya sebuah hobby adalah beternak. Beternak kecil-kecilan memang hampir menjadi kebiasaan petani. Selain sebagai stok hidup (*life stock*) untuk dikonsumsi, peternakan itu juga bisa dijual apabila memerlukan tambahan keuangan untuk kebutuhan keluarga. Kegiatan peternakan ini memang menjadi kebiasaan melekat pada masyarakat Ciwidey yang masih banyak mempunyai lahan. Peternakan mereka kebanyakan bersifat hewan-hewan ternak besar seperti sapi atau kambing. Bagi masyarakat dekat kota seperti Sumedang Selatan, betapapun, lahan mereka sudah semakin sempit. Mereka yang beternak hanya bersifat hewan-hewan kecil seperti ayam, angsa, bebek manila, dan kolam-kolam ikan.

Pemanfaatan lahan sekecil apapun nampaknya sudah menjadi kebiasaan petani yang cukup baik untuk menunjang ketahanan pangan. Bahkan dalam pekarangan rumah mereka pun, para petani dapat berbuat banyak. Selain itu, penanaman pekarangan juga dapat menjadikan lahan di sekitar rumah menjadi produktif dan terjaga kelembabannya.

Pak Enjum, 55 tahun, seorang warga Sumedang Selatan, menyatakan perawatan lahan pekarangan mudah dan bisa diproduktifkan misalnya dengan menanam pohon buah-buahan, jagung, dan singkong. Dikatakannya, pengairannya akan cukup dengan memanfaatkan air bekas cucian, sehingga pekarangan juga bisa terhindar dari kekeringan, hasil panen maksimal, sehingga dapat mengurangi beban belanja keluarga.

Pemanfaatan pekarangan untuk ditanam berbagai jenis tanaman pangan oleh warga masyarakat itu menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap kebutuhan akan pangan.

Sementara itu Ujang, warga Sumedang Selatan mengaku, memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanam sayuran organik, setiap bulan bisa menghasilkan sekitar Rp600 ribu. Luas lahannya hanya 200 meter. Di sana aneka sayuran tumbuh subur dengan memanfaatkan pupuk kotoran kambing.

Mengolah lahan pekarangan sebagai tempat tanam menguntungkan, kata dia, karena perawatannya bisa dilakukan setiap saat. Selain itu, kebutuhan air mudah dengan mengalirkan bekas mandi, cuci piring dan cuci pakaian.

Di Sumedang Selatan, ada pula petani yang mengembangkan pekarangannya untuk membudidayakan tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Mereka biasa memajangnya di pinggir-pinggir jalan. Menurut pengakuan mereka, kadang-kadang penjualan tanaman hias, bibit tanaman, dan tanaman obat-obatan itu lebih menguntungkan dari pertanian pokok itu sendiri. Namun demikian, mereka menyatakan bahwa pertanian itu memang sudah menjadi tradisi yang diwariskan dari nenek moyang. Dengan demikian, tidak boleh ditinggalkan. “Kalau tidak ada yang bertani, apa yang bisa dimakan oleh kita?” demikian kata seorang petani di wilayah Sumedang Selatan.

Sementara itu di Wilayah Agropolitan Ciwidey warga mulai memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanam jagung, sayuran, buah-buahan, singkong hasilnya bisa membantu mengurangi belanja keluarga.

Udin, warga Ciwidey menuturkan, Ciwidey dijamin bebas rawan pangan jika masyarakat setempat hemat dan kreatif. Memanfaatkan lahan pekarangan langkah tepat membantu pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pangan.

Wilayah Ciwidey cukup potensial mengembangkan sayuran, buah-buah, singkong dengan menanam di pekarangan karena banyak pupuk alam melimpah. “Yang penting kreatif dan mau bekerja keras, lahan pekarangan selalu dipelihara dengan tanaman bermanfaat,” katanya.

Ciwidey memiliki lahan pertanian subur dan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu yang cukup tinggi. Mudahnya mencari penghasilan dengan mengembangkan pola usaha kreatif juga memanfaatkan lahan pekarangan dengan berbagai tanaman pangan.

### **c. Pelestarian Alam**

Transformasi lahan menuju penggunaannya untuk menghasilkan barang dan jasa adalah cara yang paling substansial bagi manusia dalam mengubah ekosistem bumi, dan dikategorikan sebagai penggerak utama hilangnya keanekaragaman hayati. Diperkirakan jumlah lahan yang diubah oleh manusia antara 39%-50%. Degradasi lahan, penurunan fungsi dan produktivitas ekosistem jangka panjang, diperkirakan terjadi pada 24% lahan di dunia. Laporan FAO menyatakan bahwa manajemen lahan sebagai penggerak utama degradasi dan 1,5 miliar orang bergantung pada lahan yang terdegradasi. Deforestasi, desertifikasi, erosi tanah, kehilangan kadar mineral, dan salinisasi adalah contoh bentuk degradasi tanah ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Eutrofikasi adalah peningkatan populasi alga dan tumbuhan air di ekosistem perairan akibat aliran nutrisi dari lahan pertanian. Hal ini mampu menyebabkan hilangnya kadar oksigen di air ketika jumlah alga dan tumbuhan air yang mati dan membusuk di perairan bertambah dan dekomposisi terjadi. Hal ini mampu menyebabkan kebinasaan ikan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan

menjadikan air tidak bisa digunakan sebagai air minum dan kebutuhan masyarakat dan industri. Penggunaan pupuk berlebihan di lahan pertanian yang diikuti dengan aliran air permukaan mampu menyebabkan nutrisi di lahan pertanian terkikis dan mengalir terbawa menuju ke perairan terdekat. Nutrisi inilah yang menyebabkan eutrofikasi.

Pertanian memanfaatkan 70% air tawar yang diambil dari berbagai sumber di seluruh dunia. Pertanian memanfaatkan sebagian besar air di akuifer, bahkan mengambilnya dari lapisan air tanah dalam laju yang tidak dapat dikembalikan (*unsustainable*). Telah diketahui bahwa berbagai akuifer di berbagai tempat padat penduduk di seluruh dunia, seperti China bagian utara, sekitar Sungai Gangga, dan wilayah barat Amerika Serikat, telah berkurang jauh, begitu juga di wilayah lain seperti di Iran, Meksiko, dan Arab Saudi. Tekanan terhadap konservasi air terus terjadi dari sektor industri dan kawasan urban yang terus mengambil air secara tidak lestari, sehingga kompetisi penggunaan air bagi pertanian meningkat dan tantangan dalam memproduksi bahan pangan juga demikian, terutama di kawasan yang langka air. Penggunaan air di pertanian juga dapat menjadi penyebab masalah lingkungan, termasuk hilangnya rawa, penyebaran penyakit melalui air, dan degradasi lahan seperti salinisasi tanah ketika irigasi tidak dilakukan dengan baik ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Penggunaan pestisida telah meningkat sejak tahun 1950an, menjadi 2,5 juta ton per tahun di seluruh dunia. Namun tingkat kehilangan produksi pertanian tetap terjadi dalam jumlah yang relatif konstan. WHO memperkirakan pada tahun 1992 bahwa 3 juta manusia keracunan pestisida setiap tahun dan menyebabkan kematian 200 ribu jiwa. Pestisida dapat menyebabkan resistansi pestisida pada populasi hama sehingga pengembangan pestisida baru terus berlanjut ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Argumen alternatif dari masalah ini adalah pestisida merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan pada lahan yang terbatas, sehingga dapat menumbuhkan lebih banyak tanaman pertanian pada lahan yang lebih sempit dan memberikan ruang lebih banyak bagi alam liar dengan mencegah perluasan lahan pertanian lebih ekstensif. Namun berbagai kritik berkembang

bahwa perluasan lahan yang mengorbankan lingkungan karena peningkatan kebutuhan pangan tidak dapat dihindari, dan pestisida hanya menggantikan praktek pertanian yang baik yang ada seperti rotasi tanaman. Rotasi tanaman mencegah penumpukan hama yang sama pada satu lahan sehingga hama diharapkan menghilang setelah panen dan tidak datang kembali karena tanaman yang ditanam tidak sama dengan yang sebelumnya.

Pertanian adalah salah satu yang mempengaruhi perubahan iklim, dan perubahan iklim memiliki dampak bagi pertanian. Perubahan iklim memiliki pengaruh bagi pertanian melalui perubahan temperatur, hujan (perubahan periode dan kuantitas), kadar karbon dioksida di udara, radiasi matahari, dan interaksi dari semua elemen tersebut. Kejadian ekstrim seperti kekeringan dan banjir diperkirakan meningkat akibat perubahan iklim. Pertanian merupakan sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Suplai air akan menjadi hal yang kritis untuk menjaga produksi pertanian dan menyediakan bahan pangan. Fluktuasi debit sungai akan terus terjadi akibat perubahan iklim. Negara di sekitar sungai Nil sudah mengalami dampak fluktuasi debit sungai yang mempengaruhi hasil pertanian musiman yang mampu mengurangi hasil pertanian hingga 50%. Pendekatan yang bersifat mengubah diperlukan untuk mengelola sumber daya alam di masa depan, seperti perubahan kebijakan, metode praktek, dan alat untuk mempromosikan pertanian berbasis iklim dan lebih banyak menggunakan informasi ilmiah dalam menganalisa risiko dan kerentanan akibat perubahan iklim ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Pertanian dapat memitigasi sekaligus memperburuk pemanasan global. Beberapa dari peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer bumi dikarenakan dekomposisi materi organik yang berada di tanah, dan sebagian besar gas metana yang dilepaskan ke atmosfer berasal dari aktivitas pertanian, termasuk dekomposisi pada lahan basah pertanian seperti sawah, dan aktivitas digesti hewan ternak. Tanah yang basah dan anaerobik mampu menyebabkan denitrifikasi dan hilangnya nitrogen dari tanah, menyebabkan lepasnya gas nitrat oksida dan nitro oksida ke udara yang merupakan gas rumah kaca. Perubahan

metode pengelolaan pertanian mampu mengurangi pelepasan gas rumah kaca ini, dan tanah dapat difungsikan kembali sebagai fasilitas sekuestrasi karbon.

Penerapan pertanian konvensional pada tahap-tahap permulaan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan pangan secara nyata, namun kemudian efisiensi produksi semakin menurun karena pengaruh umpan balik berbagai dampak samping yang merugikan. Bila kita terapkan prinsip ekonomi lingkungan dengan menginternalisasikan biaya lingkungan dalam perhitungan neraca ekonomi suatu usaha dan program pembangunan pertanian maka yang diperoleh pengusaha dan negara adalah kerugian besar. Perhitungan GNP dan GDP yang dilakukan Pemerintah saat ini sebenarnya tidak realistis. Sayangnya biaya lingkungan jarang dimasukkan sepenuhnya dalam perhitungan neraca usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional (Pracaya, 2007).

Penelitian pertanian secara konvensional dengan biasanya pada lahan-lahan yang berpotensi tinggi, tanaman ekspor dan petani yang lebih mampu, telah memberikan hasil yang tidak terjangkau oleh sebagian besar petani. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a) Peningkatan erosi permukaan, banjir dan tanah longsor. Penurunan kesuburan tanah dan kehilangan bahan organik tanah. Pada sistem pertanian konvensional, lahan yang digunakan dapat mengalami penurunan kesuburan tanah dan kehilangan bahan organik. Hal tersebut terjadi karena seringnya penggunaan pupuk kimia ataupun bahan-bahan kimia lain seperti pestisida yang lama-kelamaan akan merusak kesuburan tanah dan mematikan organisme-organisme yang hidup di dalam tanah.
- b) Salinasi air tanah dan irigasi serta sedimentasi tanah. Peningkatan pencemaran air dan tanah akibat pupuk kimia, pestisida, limbah domestik. Pertanian konvensional adalah pertanian dengan menggunakan bahan-bahan kimia maupun alat-alat modern. Karena hal tersebut jika pertanian konvensional dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan peningkatan pencemaran air dan tanah akibat pupuk kimia, pestisida, dan limbah domestik.

- c) Residu pestisida dan bahan-bahan berbahaya lain di lingkungan dan makanan yang mengancam kesehatan masyarakat dan penolakan pasar. Penggunaan bahan-bahan kimia pada pupuk maupun pestisida pada sistem pertanian konvensional menyebabkan pencemaran lingkungan. Produk-produk yang dihasilkan kurang terjamin kebersihannya dan kelayakannya untuk dikonsumsi karena sudah terkena zat kimia. Oleh karena itu, masyarakat mulai berpikir ulang untuk mengkonsumsi produk yang tercemar oleh zat kimia.
- d) Pemerosotan keanekaragaman hayati pertanian.
- e) Kontribusi dalam proses pemanasan global. Sebagian besar pertanian konvensional selalu menggunakan teknologi tinggi yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya banyak terjadi pencemaran air dan pencemaran udara. Hal tersebut akan berkontribusi dalam proses pemanasan global.
- f) Merintang studi dan peningkatan interaksi positif antar beragam tanaman, hewan, dan manusia.
- g) Eksploitasi unsur hara. Integrasi usaha tani ke dalam pasar nasional maupun internasional menimbulkan suatu penghabisan unsur hara netto jika unsur hara yang diambil tidak dapat dikembalikan lagi. Sangat sedikit teknologi yang dikembangkan untuk mengembalikan unsur hara dari daerah/lokasi konsumen ke daerah produsen.

Dalam pertanian tradisional untuk mengolah hasil produk pertanian masih tergantung dengan alam atau ekologi sekitar. Dikarenakan dalam proses pertanian tradisional produknya hanya untuk memenuhi konsumsi petaninya, bukan untuk mencari keuntungan besar.

Adapun dampak positif yang terjadi dari pertanian tradisional yaitu: Pelestarian alam yang masih terjamin dan terus berkembang. Yang mana pelestarian alam terus berjalan karena proses ini berjalan dan akan bisa memproduksi dengan rata-rata konstan untuk musim-musim ke depannya.

Tidak adanya kerusakan ataupun pencemaran yang terjadi. Proses pertanian tradisional terjadi tanpa adanya perusakan ekosistem yang ada sekitar

maupun tanpa pencemaran yang bisa mengakibatkan penurunan hasil produktivitas pengolahan pertanian.

Namun, sejalan dengan berjalannya waktu, pertanian tradisional sudah tidak bisa lagi dipertahankan secara penuh. Untuk itu, dilakukanlah pertanian organik. Pertanian organik pun sebetulnya adalah penguatan suara tradisional di tengah lingkungan modern.

Prinsip ekologi dalam penerapan pertanian organik dapat dipilahkan sebagai berikut:

- a) Memperbaiki kondisi tanah. Dengan menggunakan sistem pertanian berkelanjutan, tanah yang rusak dapat diperbaiki sehingga menguntungkan pertumbuhan tanaman, terutama pengelolaan bahan organik dan meningkatkan kehidupan biologi tanah.
- b) Optimalisasi ketersediaan dan keseimbangan daur hara. Jika menggunakan sistem pertanian berkelanjutan ketersediaan dan keseimbangan daur hara dapat dioptimalisasi melalui fiksasi nitrogen, penyerapan hara, penambahan dan daur pupuk dari luar usaha tani.
- c) Membatasi kehilangan hasil panen akibat aliran panas, udara dan air dengan cara mengelola iklim mikro, pengelolaan air dan pencegahan erosi.
- d) Membatasi terjadinya kehilangan hasil panen akibat hama dan penyakit dengan melaksanakan usaha preventif melalui perlakuan yang aman.
- e) Pemanfaatan sumber genetika (plasma nutfah) yang saling mendukung dan bersifat sinergisme dengan cara mngkombinasikan fungsi keragaman sistem pertanian terpadu.
- f) Menghasilkan bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan.
- g) Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dipertahankan.
- h) Ramah lingkungan karena menggunakan pupuk kompos, ataupun pupuk kandang yang keseluruhannya berasal dari alam.
- i) Meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian.
- j) Menjaga sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Dalam pertanian berkelanjutan diutamakan cara pengelolaan tanah yang meminimalkan erosi, meningkatkan

kandungan bahan organik tanah serta mendorong kuantitas dan diversitas biologi tanah. Dalam pertanian organik peningkatan kesuburan tanah dilakukan tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis. Sebagai gantinya digunakan teknik-teknik seperti rotasi tanaman secara tepat, *mixed cropping* dan integrasi tanaman dengan ternak, meminimalkan pengolahan tanah yang mengganggu aktivitas biota tanah, menggunakan tanaman dalam strip dan tumpang sari.

- k) Penghematan energi. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem produksi organik hanya menggunakan 50–80% energi minyak untuk menghasilkan setiap unit pangan dibandingkan dengan sistem produksi pertanian konvensional. Namun demikian, ini tidak berlaku untuk semua sistem produksi sayuran dan buah-buahan.
- l) Tidak mencemari air. Penjagaan kualitas air merupakan upaya yang sangat penting dalam sistem pertanian lestari (*sustainable agriculture system*). Kenyataan menunjukkan bahwa polusi air tanah (*groundwater*) dan air muka tanah (*surface water*) oleh nitrat dan fosfat menjadi hal yang umum terjadi di kawasan pertanian. Residu pupuk dan pestisida sintetis serta bakteri penyebab penyakit seperti *Escherichia Coli* juga seringkali terdeteksi di sistem perairan. Pada areal pertanian organik, sumber air dijaga dengan menghindari praktek-praktek pertanian yang menyebabkan erosi tanah dan pencucian nutrisi, pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia. Kotoran hewan yang akan digunakan untuk pupuk organik selalu dikelola dengan hati-hati dan dikomposkan sebelum digunakan. Di samping itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis juga dilarang dalam sistem pertanian organik.
- m) Tidak mencemari udara. Pertanian berkelanjutan terbukti mampu meminimalkan perubahan iklim global karena emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas emission*) pada pertanian organik lebih rendah dibandingkan pertanian konvensional. Dalam pertanian organik tidak menggunakan pupuk nitrogen sintetis sehingga tidak ada emisi nitrogen oksida dari pupuk buatan tersebut. Penggunaan minyak bumi juga lebih rendah sehingga menurunkan emisi gas karbon dioksida. Lebih penting lagi, pertanian organik

menyediakan penampungan (*sink*) untuk karbon dioksida melalui peningkatan kandungan bahan organik di tanah serta penutupan permukaan tanah dengan tanaman penutup tanah.

- n) Dapat memanfaatkan limbah. Praktek pertanian berkelanjutan mengurangi jumlah limbah melalui daur ulang limbah menjadi pupuk organik. Kotoran ternak, jerami dan limbah pertanian lainnya yang selama ini dianggap limbah, justru menjadi bahan yang mempunyai nilai sebagai sumber nutrisi dan bahan organik bagi pertanian organik.
- o) Menciptakan keanekaragaman hayati. Pertanian organik tidak hanya menghindari penggunaan pestisida sintetis, namun juga mampu menciptakan keanekaragaman hayati. Praktek seperti rotasi pertanaman, tumpang sari serta pengolahan tanah konservasi merupakan hal-hal yang mampu meningkatkan keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat yang sehat bagi banyak spesies mulai dari jamur mikroskopis hingga binatang besar. Pertanian organik tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika (*Genetic Engineering Organism*) atau organisme transgenik (*Genetically Modified Organism*) serta produknya karena alasan keamanan lingkungan, kesehatan dan sosial. Produk-produk seperti ini tidak dibutuhkan karena mungkin menyebabkan resiko yang tidak dapat diterima pada integritas spesies.

Pola pertanian yang dikembangkan di kedua kawasan yang diteliti, nampaknya mengarah pada pertanian organik. Demikian karena secara kesehatan, pola pertanian itu cukup mendukung, begitu pula dengan keuntungan ekonomis.

#### **d. Pola Pertanian Sederhana**

Dalam pertanian modern (spesialisasi), pengadaan pangan untuk kebutuhan sendiri dan jumlah surplus yang bisa dijual, bukan lagi merupakan tujuan pokok. Keuntungan (profit) komersial murni merupakan ukuran keberhasilan dan hasil maksimum per hektar dari hasil upaya manusia (irigasi, pupuk, pestisida, bibit unggul, dan lain-lain) dan sumber daya alam merupakan tujuan kegiatan pertanian.

Pada sistem pertanian konvensional terdapat beberapa evaluasi terhadap aspek ekonomi. Pertanian konvensional jika dilihat dari aspek ekonomi antara lain:

- a) Penurunan lapangan kerja dan peningkatan pengangguran. Dalam sistem pertanian konvensional digunakan teknologi dan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Dengan digunakannya teknologi, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh petani digantikan oleh mesin yang berteknologi tinggi. Sehingga para petani lambat laun mulai banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyaknya petani yang tidak bekerja dapat meningkatkan angka pengangguran. Lapangan pekerjaan untuk petanipun berkurang karena semua kegiatan bertani dapat dilakukan oleh mesin.
- b) Peningkatan kemiskinan dan malnutrisi di perdesaan. Petani yang pekerjaannya telah digantikan oleh mesin akan menjadi pengangguran dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena itu, kemiskinan semakin meningkat dan banyak anak-anak yang mengalami malnutrisi karena kekurangan makan. Hal tersebut terjadi kebanyakan di daerah perdesaan, karena kebanyakan petani perdesaan adalah petani dengan modal kecil.
- c) Pengeluaran lebih banyak. Dengan penggunaan teknologi, sudah pasti biaya produksi akan lebih tinggi karena mesin-mesin harus dibeli dengan biaya yang tinggi. Selain itu, pengadaan benih berkualitas tinggi juga sangat mahal. pemberian pupuk dan pemberantasan hama menggunakan zat kimia juga akan menambah biaya produksi.
- d) Mendapatkan penghasilan lebih banyak atau untung. Hasil produksi dari sistem pertanian konvensional lebih banyak daripada pertanian organik. Dengan hasil yang banyak tersebut petani konvensional akan mendapat untung yang banyak dari hasil penjualan produk pertaniannya.
- e) Hanya bisa dilakukan petani dengan modal besar. Sebagian besar yang melakukan sistem pertanian konvensional adalah petani dengan modal besar karena biaya produksi yang digunakan untuk membeli mesin, bahan tanam

yang berkualitas tinggi, serta pestisida maupun pupuk kimia memerlukan biaya yang cukup besar.

- f) Berorientasi pada pasar ekspor dan lokal. Pada sistem pertanian konvensional, produk hasil diorientasikan pada pasar lokal dan ekspor. Hasil yang banyak selain dapat memenuhi kebutuhan lokal juga dapat dijual di pasaran ekspor. Para petani banyak yang menjual hasil pertaniannya di pasar ekspor karena harga jualnya tinggi.
- g) Mempunyai resiko produksi yang tinggi. Sistem pertanian konvensional mempunyai resiko produksi yang tinggi karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi sangat besar. Apabila pada proses produksi terjadi kegagalan misalnya seperti kerusakan mesin ataupun gagal panen tentunya resiko biaya produksi tidak kembali sangat besar. Dan petani akan mengalami kerugian.

Jika diperbandingkan dengan sistem pertanian tradisional, terdapat beberapa evaluasi terhadap aspek ekonomi. Pertanian tradisional jika dilihat dari aspek ekonomi antara lain: penggunaan teknologi yang belum berkembang, masih menggunakan tenaga kerja, modal masih sedikit, hasil produksi belum terjangkau,

Dalam sistem pertanian tradisional, penggunaan teknologi yang belum berkembang. Dalam hal ini biasanya pada pertanian tradisional menggunakan alat atau teknologi yang masih rendah atau belum berkembang. Yang mana hal ini dapat memperlambat hasil yang diproduksi dan akan membuang waktu dalam proses bercocok tanam. Misalnya pada sistem tradisional masyarakat untuk membajak sawah masih menggunakan kerbau hal ini masih kurang efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan tenaga. Akan tetapi dari sektor ekonominya lebih rendah dan minim pengalangan untuk mengelolah lahan untuk menghasilkan produk.

Dari segi tenaga kerja, pertanian tradisional masih banyak menggunakan tenaga kerja. Untuk pertanian tradisional biasanya digunakan lebih banyak dalam mengelola lahan pertanian untuk menghasilkan produksi. Hal ini dikarenakan masih minimnya teknologi yang ada sehingga pelaksanaan menggunakan SDM (sumber daya manusia) yang ada. Sebagai contoh dalam hal panen tanaman tebu

yang mana digunakan tenaga kerja manusia dalam proses penebangan, kemudian contoh lain proses perontokan helai padi yang masih menggunakan tenaga manusia untuk melakukan walaupun saat ini mulai ada teknologi yang membantu merontokkan helai padi. Hal ini mencerminkan bahwa pertanian tradisional masih tergantung dengan sumber tenaga manusia yang ada, akan tetapi dari sektor ekonominya lebih murah.

Dari segi modal, pertanian masih menggunakan modal yang sedikit. Dalam hal ini modal dalam pengelolaan produksi pertanian masih sedikit karena kebutuhan yang dibuat tidak terlalu membutuhkan modal lebih. Biasanya juga hanya butuh modal untuk pembayaran tenaga kerja dan lain-lain yang rata-rata minim.

Tidak heran jika kemudian, hasil produksi yang masih kurang terjangkau. Dalam pertanian tradisional sering hasil yang diproduksi hanya sebatas untuk dikonsumsi keluarga maupun masyarakat golongan lain. Hal ini dikarenakan masih minimnya cara budidaya tanaman sehingga produk yang dihasilkan masih rendah.

Sifat-sifat seperti di atas, sedikit demi sedikit mulai terkikis disebabkan adanya kemajuan zaman. Oleh karena itu, para petani di Sumedang Selatan mulai melihat pada penerapan pertanian organik.

Penerapan pertanian organik, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat antara lain:

Produksi pertanian organik jauh di bawah hasil produksi sistem konvensional. Adanya perbedaan hasil ini mencerminkan adanya perbedaan teknik bercocok tanam dan pengalaman petani. Industri pangan organik berkembang sangat cepat sementara petani belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menerapkan sistem pertanian organik yang benar. Perbedaan hasil juga seringkali bergantung pada jenis tanaman yang diusahakan. Pada kasus cuaca yang tidak normal, misalnya musim kering yang panjang, maka produktivitas pertanian organik biasanya lebih tinggi dibanding pertanian konvensional. Di samping itu, pertanian organik juga relatif lebih tahan terhadap gangguan hama dan penyakit.

Minimnya akses transportasi pada lokasi-lokasi yang memenuhi syarat untuk budidaya pertanian organik. Minimnya akses transportasi disebabkan karena daerah yang memenuhi syarat untuk budidaya pertanian organik adalah daerah yang minim pencemaran lingkungan. Hal ini menimbulkan beberapa implikasi lanjutan antara lain: (a) sulitnya mendistribusikan bahan input atau sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida organik, benih, dan peralatan kerja; (b) sulitnya membawa hasil/produk pertanian organik dari lahan ke pasar; (c) mahalnya biaya untuk transportasi dari dan ke lokasi budidaya pertanian organik.

Pertanian berkelanjutan memerlukan biaya produksi relatif lebih rendah dibandingkan pertanian konvensional. Khususnya untuk penyediaan input produksi pertanian konvensional memiliki biaya produksi lebih tinggi daripada pertanian berkelanjutan. Dalam pertanian berkelanjutan pembelian pupuk dan pestisida sintetis tidak diperlukan lagi. Pengendalian gulma dilakukan secara mekanis. Pengolahan tanah untuk pengendalian gulma setelah tanaman tumbuh dilakukan dengan cara minimal. Banyak orang berpendapat bahwa pengendalian gulma akan meningkatkan frekuensi pengolahan tanah dan juga biaya. Dalam prakteknya, ternyata tidaklah demikian. Dengan perbaikan struktur tanah dan praktek pengelolaan yang baik, pertanian berkelanjutan justru meminimalkan pengolahan tanah, atau lebih sedikit, dibanding pertanian konvensional.

Secara umum, biaya produksi lebih rendah dan pendapatan lebih besar (karena *premium price*). Industri organik berubah sangat cepat sehingga mempengaruhi ketidakstabilan harga. Sebagai contoh, adanya harga tinggi pada satu jenis komoditi telah mendorong banyak petani menanam komoditi yang sama secara bersamaan. Ini menyebabkan harga turun ketika musim panen. Banyak orang berpendapat bahwa sejalan dengan berjalannya waktu *premium price* akan stabil. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani, sebagai contoh biaya pembelian pupuk organik lebih murah dari biaya pembelian pupuk kimia.

Dalam sistem pertanian organik, harga jual hasil pertanian organik seringkali lebih mahal. Contoh, harga beras organik saat ini Rp. 10.000 – 15.000,-/kg sedang beras biasa Rp. 8.500 – 10.000,-/kg.

Petani dan peternak bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari penjualan jerami dan kotoran ternaknya. Bagi peternak sendiri, biaya pembelian pakan ternak dari hasil fermentasi bahan organik lebih murah dari pakan ternak konvensional.

Pengembangan pertanian organik berarti memacu daya saing produk agribisnis Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar internasional akan produk pertanian organik yang terus meningkat. Ini berarti akan mendatangkan devisa bagi pemerintah daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Menciptakan lapangan kerja baru dan keharmonisan kehidupan sosial di perdesaan. Pertanian berkelanjutan akan merangsang hadirnya industri kompos rakyat yang berarti adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat perdesaan. Di samping itu, penerapan pertanian berkelanjutan juga akan merangsang adanya kerjasama kemitraan antara petani peternak-pekebun untuk menerapkan sistem pertanian terpadu. Dalam hubungan ini, peternak mendapatkan bahan makanan ternak dari limbah pertanian (jerami dan dedak, misalnya) dari petani, sedangkan petani mendapatkan kotoran hewan dari peternak sebagai bahan kompos untuk usaha pertanian organiknya. Hal ini secara langsung akan menciptakan keharmonisan kehidupan sosial di perdesaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Permasalahan ketahanan pangan petani dalam hal produksi dan konsumsi barangkali tidak terlalu bermasalah, karena memang sudah biasa dilakukan, baik secara tradisional maupun modern. Yang menjadi masalah adalah dalam hal distribusi. Dengan masih adanya tengkulak yang menjadi bandar dirasakan dapat mengurangi rejeki dari para petani itu sendiri.
2. Kearifan individual petani dalam ketahanan pangan terlihat dari cara hidup mereka yang sederhana. Kesederhanaan itu merupakan cara hidup tersendiri yang melekat pada petani, karena hasil produksi yang didapat dari pertanian mereka tidak selamanya mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan ketika terjadi gagal panen, para petani itu menabung di masa-masa panen bagus. Hidup mewah tidaklah menjadi gaya hidup petani, baik itu di lingkungan petani tradisional maupun modern.
3. Kearifan komunal petani dapat dilihat dalam proses pembangunan perdesaan di Kecamatan Sumedang Selatan dan Wilayah Agropolitan Ciwidey Kabupaten Bandung. Di situ terlihat peranan petani yang sangat signifikan, meskipun peranan tersebut lebih pada pembangunan di tingkat desa dibanding dalam skala yang lebih luas, yakni kecamatan. Partisipasi petani tersebut berupa pemunculan ide-ide, identifikasi dan perumusan masalah, pelaksanaan hingga evaluasi yang terkadang dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan bersifat *bottom up* dan pengkomunikasian pesan-pesan pembangunan disampaikan melalui media-media pertemuan dengan warga.
4. Kearifan budaya petani dapat dilihat pada budaya kerja mereka yang terampil, terutama pada kerja-kerja tambahan, sambil menunggu masa panen dan masa-masa lain yang diperlukan untuk pembudidayaan pertanian mereka. Variasi bentuk pekerjaan tambahan mereka seperti ada yang berdagang, menjadi

buruh, dan sebagainya menunjukkan keterbukaan mereka terhadap perubahan, dan juga ketahanan mereka terhadap tantangan hidup.

5. Kekuatan petani tradisional terletak pada ketahanannya dari modernisasi dan massifikasi pertanian, sehingga yang muncul adalah kualitas tinggi dari produk pertanian. Sedangkan kelemahan petani tradisional adalah keterlambatannya dalam penghasilan ekonomi. Demikian sehingga, banyak generasi penerus petani yang tidak tertarik untuk melanggengkan pola pertanian tradisional, bahkan ada yang meninggalkan sama sekali dunia pertanian itu sendiri. Kekuatan pertanian modern memang ada pada massifikasi pertanian, sehingga bisa menghasilkan produksi yang berlebihan. Namun, keanekaragaman hayati menjadi kurang diperhatikan. Begitu pula, seringkali secara ekonomis harga menjadi jatuh, karena para petani saling meniru dalam memproduksi pertanian mereka.

## **B. Saran**

Setelah menyimpulkan dan mempertimbangkan implikasi di atas, ada hal-hal yang perlu disarankan seperti berikut:

1. Pemerintah dituntut untuk senantiasa memperhatikan dengan penuh apresiasi dan memantau perkembangan perwujudan inisiatif masyarakat sehingga dapat dilakukan upaya fasilitasi terhadap berbagai inisiatif masyarakat tersebut secara legal melalui perlindungan peraturan-peraturan dan perlunya mengkaji secara kritis berbagai produk perundangan tentang pertanian rakyat sehingga memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan inisiatif dan keberdayaan dirinya.
2. Pemerintah, utamanya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu meningkatkan perhatian terhadap pembinaan sumber daya manusia (terutama motif yang mendorong) dan penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menstimulasi daerah-daerah tertentu yang memiliki perhatian, komitmen, dan penganggaran dalam pembangunan perdesaan berbasis pertanian.

3. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk memecahkan kebekuan komunikasi dengan menjadi mediator bagi para pelaku (*stakeholder*), baik masyarakat petani maupun pasar.
4. Untuk pihak universitas, seperti halnya Universitas Winaya Mukti di Sumedang, disarankan agar banyak mengkampanyekan lagi pertanian organik yang dapat menguntungkan bagi petani itu sendiri dan untuk konsumsi masyarakat.
5. Untuk dapat memberdayakan petani dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan guna meningkatkan pencapaian ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa dapat dilakukan dengan strategi; (1) Meningkatkan keberpihakan dan dukungan (*political-will*) pemerintah kepada petani, (2) Meningkatkan kualitas SDM petani, (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk mendorong peran petani, (4) Optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan yang menaungi dan memfasitasi kepentingan petani, dan (5) Memperkuat akses permodalan yang dimiliki petani. Implementasi strategi-strategi ini berupa upaya-upaya yang melibatkan pemangku kepentingan seluas-luasnya dengan metode yang beragam.
6. Dengan keterlibatan petani dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi hasil pertanian, maka diharapkan dapat menambah penghasilan, agar meningkatkan kesejahteraan petani. Pada sisi lain, keterlibatan petani dalam sistem distribusi pangan dapat lebih mengefisienkan rantai distribusi pangan, sehingga keamanan distribusi dapat lebih terjamin dan mengakibatkan harga bahan pangan lebih bersaing dan tidak mudah dipermainkan oleh oknum distributor. Dengan demikian maka ketahanan pangan akan tercapai dan memberi kontribusi terhadap perwujudan kemandirian bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka. 1999. *Mendayagunakan Kearifan Tradisi dalam Pertanian yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Agustian, A. dan Mayrowani, H. 2008. "Pola Distribusi Komoditas Kentang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1 Juni 2008.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. (Edisi Revisi II), Cetakan XI, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bachriadi, Dianto. 2014. "Adakah Jalan Kedaulatan Pangan dan Pembaruan Agraria di Indonesia?" dalam Bernstein, H. & Bachriadi, D. 2014. *Tantangan Kedaulatan Pangan*. Bandung: ARC Books.
- Bernstein, Henry. 2014. "Kedaulatan Pangan melalui 'Jalan Petani': Sebuah Pandangan Skeptis" dalam Bernstein, H. & Bachriadi, D. 2014. *Tantangan Kedaulatan Pangan*. Bandung: ARC Books.
- Blake, H. Reed & Edwin O. Haroldsen, 2003, *Taksonomi Ilmu Komunikasi*, Papyrus, Surabaya.
- Chambers, Robert, 1983, *Rural Development: Putting the Last First*, Edinburgh: Pearson Education Ltd.
- Dewanta, A. S. dkk. (eds.). 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Djuhar Yahya, S.. 1997. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta.
- Effendi, Onong Uchjana. 1985. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. CV. Remadja Karya. Bandung.
- Effendi, Onong Uchjana. 1995. *Dinamika Ilmu Komunikasi*. CV Rosda Karya. Bandung.
- FAO. 2008. *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security, Food Security for Action: Practical Guides*. Rome: EC-FAO Food Security Programme.
- Hadi, S. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Gama Press. Yogyakarta.

- Hanafi, Abdillah, 1987, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Jahi, Amri, 1988, *Komunikasi Massa dan Pembangunan Perdesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Jayadinata, T. Johara. 1992. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Liliweri, Alo, 1991, *Komunikasi Antar Pribadi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miles, M.B. dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Zulkarimen. 1996. *Komunikasi Pembangunan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia. Jakarta.
- Palapah, M.O. dan Atang Syamsudin. 1985. *Studi Ilmu Komunikasi*. Fikom Unpad. Bandung.
- Pattinama, Marcus J. 2009. "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal: Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat" *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13 No. 1 Juli 2009.
- Rahman, M. Taufiq. 2011. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Rakhmat, Jalaluddin. Drs. M.Sc. 1992. *Psikologi Komunikasi*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Rakhmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rustiadi, Ernand dan Pranoto, Sugimin. 2007. *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan*. Bogor: Crestpent Press.
- Setiawan, Eko. 2009. "Kearifan Lokal Pola Tanam Tumpangsari di Jawa Timur," *Jurnal Agrovigor* Vol. 2 No. 2 September 2009.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.

- Siregar, Amir Effendi. 1991. *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Siregar, Ashadi, 1990, *Komunikasi Sosial*, BPP Fisip UGM, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Pengantar Sosiologi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Supratiknya, A, 1995, *Komunikasi Antar Pribadi, Tinjauan Psikologi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Susanto, Astrid, 1985, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Bina Ilmu, Bandung.
- Tupan. 2011. *Wujudkan Ketahanan Pangan dengan Kearifan Lokal*. Jakarta: PDII-LIPI.